



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DAN PEMERINTAH DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan keamanannya, perlu di atur akses arsip dinamis untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis sebagai Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 21 Seri E);
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 70);

-
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DAN PEMERINTAH DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

8. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang pengelolaan arsip dinamis.
9. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
10. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
11. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
12. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
13. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.
14. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
15. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
16. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/ penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
17. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip.
18. Tingkat Klasifikasi keamanan arsip dinamis adalah pengelompokkan arsip dalam tingkatan tertentu berdasarkan dampak yang ditimbulkan apabila informasi yang terdapat di dalamnya diketahui oleh pihak yang tidak berhak.
19. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi

- penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
20. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
 21. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
 22. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
 23. Penggunaan arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
 24. Pengguna Internal adalah setiap orang atau pencipta arsip yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa.
 25. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa.
 26. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip dinamis.
 27. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Pasal 2

Pencipta Arsip di daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. mendorong Perangkat Daerah dan Perangkat Desa agar memberkaskan dan menata arsip dinamis secara tertib dan teratur disertai daftar arsipnya;
- b. memberikan petunjuk kepada Perangkat Daerah dan Perangkat Desa agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip dinamis yang telah ditetapkan;
- c. melindungi fisik dan informasi arsip dinamis dari kerusakan dan kehilangan sehingga kebutuhan akan ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, integritas, otentisitas dan realibilitas arsip tetap dapat terpenuhi; dan
- d. mengatur akses arsip dinamis yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. memberikan acuan dalam pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa;
- b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik secara cepat, tepat, murah, dan aman;
- c. menjamin tersedianya informasi arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya oleh publik sesuai dengan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan
- d. menjamin keamanan arsip dinamis bagi informasi yang dikecualikan.

BAB II

PRINSIP DASAR KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 4

- (1) Prinsip dasar dalam penetapan klasifikasi keamanan arsip dinamis adalah:
 - a. memperhatikan tingkat keseriusan dampak yang timbul apabila informasi yang terdapat dalam arsip dinamis disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah;
 - b. penetapan klasifikasi keamanan arsip dinamis harus disertai alasan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tingkat klasifikasi.

- (2) Prinsip dasar dalam penetapan hak akses arsip dinamis meliputi :
- a. pengaksesan arsip dinamis hanya dapat dilakukan oleh pejabat dan staf yang mempunyai kewenangan untuk akses;
 - b. pejabat yang lebih tinggi kedudukannya dapat mengakses arsip dinamis yang dibuat oleh pejabat atau staf di bawahnya sesuai dengan hierarki kewenangannya dalam struktur organisasi;
 - c. pejabat atau staf yang lebih rendah kedudukannya tidak dapat mengakses arsip dinamis yang dibuat oleh pejabat di atasnya kecuali sebelumnya telah diberikan izin oleh pejabat yang berwenang.

BAB III

ASAS DAN PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa dilaksanakan dengan menggunakan asas gabungan, yaitu sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan.
- (2) Penetapan kebijakan dalam klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyusunan dan penerapan peraturan;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. sarana dan prasarana.

Pasal 6

- (1) Pengorganisasian Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. arsip Dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa diklasifikasikan menjadi informasi biasa/terbuka, terbatas, dan rahasia;
 - b. teknis pengamanan arsip dinamis dilakukan berdasarkan tingkat klasifikasi informasi arsip sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. pengaturan akses arsip dinamis dilakukan berdasarkan tingkat klasifikasi informasi arsip sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- d. setiap Pegawai/Perangkat Desa hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab dan kewenangannya; dan
- e. publik dapat mengakses informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa yang dikategorikan biasa/terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

BAB IV

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu

Penyusunan Klasifikasi Keamanan dan Penentuan Hak Akses Arsip Dinamis

Pasal 7

Penyusunan klasifikasi keamanan dan penentuan hak akses Arsip Dinamis dilakukan pada lingkup penciptaan dan penggunaan Arsip dengan memperhatikan :

- a. identifikasi ketentuan hukum;
- b. analisis fungsi unit pengolah dalam organisasi;
- c. analisis jabatan; dan
- d. analisis resiko.

Pasal 8

Identifikasi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a digunakan sebagai dasar penentuan klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis berpedoman pada :

- a. peraturan perundangan-undangan di bidang kearsipan;
- b. peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik;
- c. peraturan perundang-undangan di bidang transaksi dan informasi elektronik; dan
- d. peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.

Pasal 9

- (1). Analisis fungsi unit pengolah dalam organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dipergunakan untuk menentukan unit pengolah yang memiliki fungsi strategis bagi organisasi berdasarkan fungsi substantif (kegiatan utama) dan fungsi fasilitatif (kegiatan pendukung)

sesuai dengan urusan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa.

- (2) Arsip yang dihasilkan dari analisis fungsi unit pengolah dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan nilai strategis bagi individu, masyarakat, organisasi dan negara.

Pasal 10

- (1) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c digunakan untuk melakukan analisis sumber daya manusia sebagai penanggung jawab dan pengelola arsip yang berisikan suatu catatan sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu, yang diuraikan berdasarkan fungsinya dalam struktur organisasi.
- (2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. identifikasi jabatan, berisi informasi tentang nama jabatan dan bagian dalam suatu organisasi;
 - b. fungsi jabatan, berisi penjelasan tentang kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan struktur organisasi;
 - c. tugas-tugas yang harus dilaksanakan; dan
 - d. pengawasan yang harus dilakukan dan yang diterima.
- (3) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan penggolongan personil yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pembuatan, penanganan, pengelolaan keamanan informasi dan diberi hak akses arsip dinamis.
- (4) Penggolongan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk menjamin perlindungan, pengamanan informasi dan tingkatan hak akses arsip dinamis yang terdiri dari :
 - a. penentu kebijakan;
 - b. pelaksana kebijakan; dan
 - c. pengawas.

Pasal 11

- (1) Analisis resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dipergunakan untuk memberikan pertimbangan terhadap pengklasifikasian keamanan dan hak akses arsip dinamis.
- (2) Analisis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dampak kerugian yang ditimbulkan terhadap keamanan

individu, masyarakat, organisasi, dan negara apabila suatu arsip diakses oleh orang yang tidak berhak.

Bagian Kedua

Kategori Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis

Pasal 12

- (1) Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa berdasarkan klasifikasi keamanan arsip terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :
 - a. Biasa/Terbuka;
 - b. Terbatas; dan
 - c. Rahasia.
- (2) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penggolongan Hak Akses Arsip Dinamis

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa

Pasal 13

- (1) Penggolongan pengguna yang berhak untuk mengakses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas meliputi :
 - a. Pengguna Internal; dan
 - b. Pengguna Eksternal
- (2) Penggolongan pengguna yang berhak untuk mengakses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Desa meliputi :
 - a. Pengguna Internal; dan
 - b. Pengguna Eksternal.

Pasal 14

- (1) Pengguna Internal yang berhak untuk mengakses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penentu kebijakan :
 - 1). Pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Bupati dan Wakil Bupati;
 - 2). Pimpinan tingkat tinggi, yaitu Sekretaris Daerah;

- 3). Pimpinan tingkat menengah, yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (pejabat struktural setara eselon IIb).
 - b. pelaksana kebijakan; dan
 - c. pengawas internal.
- (2) Pengguna Internal yang berhak untuk mengakses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. penentu kebijakan :
 - 1). Pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Kepala Desa;
 - 2). Pimpinan tingkat tinggi, yaitu Sekretaris Desa;
 - b. pelaksana kebijakan.

Pasal 15

Penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pimpinan tingkat tertinggi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
- b. Pimpinan tingkat tinggi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan
- c. Pimpinan tingkat menengah mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi dan yang satu tingkat di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.

Pasal 16

- (1) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip dinamis dengan tingkat klasifikasi biasa/terbuka dan terbatas yang berada di bawah kewenangannya, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dinamis dengan tingkat klasifikasi terbatas dan rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat

tinggi, pimpinan tingkat menengah, dan yang satu tingkat dengan unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.

- (2) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. pejabat Administrator (pejabat struktural setara eselon III);
 - b. pejabat Pengawas (pejabat struktural setara eselon IV);
 - c. pejabat Fungsional Arsiparis;
 - d. petugas Pengelola Arsip; dan
 - e. pelaksana/staf.
- (3) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Desa terdiri atas :
 - a. Kepala Urusan;
 - b. Kepala Seksi;
 - c. Kepala Dusun;
 - d. Arsiparis;
 - e. Petugas Pengelola Arsip; dan
 - f. staf.

Pasal 17

Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip dinamis pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh informasi dengan kategori biasa/terbuka;
- b. Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dinamis pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti : pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- c. Aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip dinamis pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum

yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

BAB III PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 19

- (1) Pengamanan arsip dinamis dilakukan oleh Pencipta Arsip terhadap fisik dan informasinya sesuai dengan tingkat klasifikasi keamanan dan akses arsip dalam bentuk penyimpanan dan penyampaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengamanan arsip dinamis dalam penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana dan prasarana, penentuan pengelola arsip serta Daftar Arsip Terbatas dan Daftar Arsip Rahasia.

Pasal 20

- (1) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengamanan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berupa sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa : almari arsip (*filling cabinet*) untuk menyimpan arsip dinamis dengan klasifikasi keamanan kategori biasa/terbuka dan terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk arsip dinamis dengan klasifikasi keamanan kategori rahasia;
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi dengan dilengkapi pemasangan kamera pengawas (*CCTV*) dan kunci pengamanan ruangan.
- (3) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip terjaga dan arsip vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

Pasal 21

- (1) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau petugas pengelola arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) harus mempunyai jiwa yang profesional secara substansi kearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas.
- (2) Penunjukan Pegawai sebagai Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati, untuk pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; dan
 - b. Kepala Desa, untuk pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Desa.

Pasal 22

Penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di pusat pengelola arsip (*central file*) dan pusat arsip (*record center*).

Pasal 23

- (1) Penyimpanan dalam rangka pengamanan arsip dinamis dilakukan sesuai tingkat klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dengan memperhatikan media arsip.
- (2) Ketentuan penggunaan, prasarana dan sarana penyimpanan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Penyampaian dalam rangka pengamanan arsip dinamis harus dilakukan sesuai tingkat klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis dengan menggunakan media pengiriman yang dilindungi.
- (2) Prosedur pengiriman arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 36



LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 36 TAHUN 2020
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
 DINAMIS PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DAN
 PEMERINTAH DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN
 BANYUMAS

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
 DAN PEMERINTAH DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
I	000	UMUM				
1.	001	Lambang	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah :Sub Bag. Umum SETDA : Bag. Umum, Bag. Organisasi, Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan. PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
	001.1	Garuda				
	001.2	Bendera Kebangsaan				
	001.3	Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)				
2.	002	Tanda Kehormatan/ Penghargaan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum SETDA : Bag. Umum, Bag. Organisasi, Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan. PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
	002.1	Bintang				
	002.2	Satyalencana				
	002.3	Satyakarya Nugraha				
	002.4	Penghargaan secara adat				
	002.5	Penghargaan lainnya (Adipura, Kalpataru, dsb.)				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3.	003	Hari Raya/ Hari Besar	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum SETDA : Bag. Umum, Bag. Organisasi, Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bag. Kesra PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
	003.1	Nasional (17 Agustus, Hari Pahlawan, Hardiknas, dsb.)				
	003.2	Keagamaan				
	003.3	Hari Ulang Tahun / HUT (Kabupaten, Kota, Provinsi)				
4.	004	Ucapan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum SETDA : Bag. Umum, Bag. Organisasi, Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bag. Kesra PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
	004.1	Ucapan terima kasih				
	004.2	Ucapan selamat				
	004.3	Ucapan mohon diri				
	004.4	Ucapan belasungkawa				
	004.5	Ucapan lainnya				
5.	005	Undangan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum SETDA : Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
6.	006	Tanda Jabatan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum SETDA : Bag. Umum, Bag. Organisasi, Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan, PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
	006.1	Pamong Praja				
	006.2	Pejabat lainnya				
	007	Tanda Gambar Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Pemerintah				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
7.	010	URUSAN DALAM				
8.	011	Gedung Kantor	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum SETDA : Bag. Umum, Bag. Perlengkapan PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
	011.1	Instalasi Listrik				
	011.2	Telepon				
	011.3	Internet				
	011.4	Air Minum				
	011.5	Hidrant				
	011.6	Alarm				
011.7	Drainage					
9.	012	Rumah Dinas	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
	012.1	Tanah untuk Rumah Dinas				
	012.2	Perabotan				
10.	013	Persinggahan / akomodasi	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bag. Umum Badan Keuangan dan Aset Daerah : Bidang aset Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
	013.1	Mess				
	013.2	Wisma				
	013.3	Apartemen, Rumah Susun				
11.	014	Pengurusan kendaraan dinas	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah : Bidang aset Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
12.	015	Penerangan Listrik / Jasa Listrik	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
13.	016	Peminjaman sarana prasarana kantor	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
14.	017	Keamanan / Ketertiban kantor	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
15.	018	Kebersihan Kantor	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
16.	019	Protokol	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bag. Umum, Bagian Humas dan Protokol Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan TU & Umum
	019.1	Upacara Bendera				
	019.2	Tata tempat (Pemasangan Gambar Presiden / Wakil Presiden, Bupati / Wakil Bupati)				
	019.3	Audiensi				
	019.4	Penerimaan Tamu				
	019.5	Kerjasama				
	019.6	Bandir/ Umbul-umbul				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
17.	020	BARANG DAN JASA				
18.	021	Penawaran	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
	021.1 021.2	Penawaran Barang Penawaran Jasa				
19.	022	Pesanan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
	022.1	Alat tulis				
	022.2	Mesin kantor				
	022.3	Perabot kantor				
	022.4	Peralatan lainnya				
20.	023	Jasa	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
21.	024	Alat angkutan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
22.	025	Rencana Kebutuhan Barang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
23.	026	Sensus Barang	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah : Bidang Aset Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan TU dan Umum

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
24.	027	Pengadaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah SETDA : Bag. Layanan Pengadaan Brg /Jasa Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan TU dan Umum
	027.1	Penunjukan Langsung				
	027.2	Lelang				
	027.3	Barang Inventaris				
	027.4	Barang non Inventaris				
25.	028	Inventaris	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah : Bid. Aset Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
	028.1	Pemeliharaan				
	028.2	Mutasi				
	028.3	Penghapusan				
26.	029	Pelaporan barang	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah : Bid. Aset Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
27.	030	<i>KEKAYAAN DAERAH</i>				
28.	031	Barang-barang tidak bergerak (tanah, kebun, dll.)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
29.	032	Barang-barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen, bangunan bersejarah, dll.)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah : Bid. Aset Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
30	033	Tanaman	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah : Bid. Aset Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
31.	034	Alat-alat berat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah : Bid. Aset Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
32.	035	Hewan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah : Bid. Aset Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
33.	036	Barang persediaan dalam gudang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah : Bid. Aset Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
34.	037	Alat pengangkut (darat, laut, udara)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah : Bid. Aset Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
35.	038	Peralatan kantor/ pabrik	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah : Bid. Aset Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
36.	039	Peralatan kesehatan (Rumah Sakit, Balai Pengobatan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	RSUD Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
37.	040	<i>PERPUSTAKAAN / DOKUMENTASI / KEARSIPAN / SANDI</i>				
38.	041	Perpustakaan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Dinas ARPUSDA : Bidang Perpustakaan Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum SETDA : Bag. Hukum, Bag. Humas PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
	041.1	Pengolahan				
	041.2	Layanan / sirkulasi				
	041.21	Keanggotaan				
	041.22	Peminjaman dan pengembalian				
	041.3	Deposit				
	041.4	Pemeliharaan, pelestarian bahan pustaka				
	041.5	Pengadaan Bahan Pustaka				
041.6	Pembinaan perpustakaan					
	041.7	Publikasi / promosi perpustakaan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Dinas ARPUSDA Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum SETDA : Bag. Hukum, Bag. Humas PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
	041.8	Jenis-jenis Perpustakaan (Umum, Khusus, Sekolah, Perguruan Tinggi, Keliling, Masyarakat)				
	041.9	Kemitraan, Kerjasama antar perpustakaan				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
39.	042	Dokumentasi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum SETDA : Bag. Umum, Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan. PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
40.	045	Kearsipan Kebijakan, penyusunan NSPK	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Dinas ARPUSDA : Bidang Binbangwas
	045.1	Pengelolaan arsip dinamis	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
	045.11	Klasifikasi Arsip				
	045.12	Penataan berkas				
	045.2	Pengelolaan arsip statis	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Dinas ARPUSDA : Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip (PPA)
	045.21	Akuisisi arsip				
	045.22	Penelusuran arsip statis				
	045.23	Akses arsip	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Dinas ARPUSDA : Bidang PPA Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
045.3	Layanan arsip	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Dinas ARPUSDA : Bidang PPA Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum	

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	045.4	Penyusutan Arsip	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Dinas ARPUSDA : Bidang PPA Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
	045.41	Penilaian Arsip				
	045.42	Pemindahan Arsip				
	045.43	Penyerahan Arsip				
	045.44	Pemusnahan Arsip				
	045.45	Berita Acara Penyusutan Arsip				
	045.46	Daftar Arsip				
	045.5	Pembinaan Kearsipan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Dinas ARPUSDA : Bidang Binbangwas Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
	045.51	Bimbingan Teknis				
	045.52	Monitoring, evaluasi, pengawasan, supervisi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Dinas ARPUSDA : Bidang Binbangwas Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
	045.6	Pemeliharaan, perawatan, pelestarian arsip	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Dinas ARPUSDA : Bidang PPA Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
	045.61	Fumigasi, termyte control				
	045.62	Laminasi, encapsulasi				
	045.7	Alih media	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Dinas ARPUSDA : Bidang PPA Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	045.8	Pengembangan Sistem Kearsipan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Dinas ARPUSDA : Bidang Binbangwas Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
	045.9	Pemasyarakatan Kearsipan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Dinas ARPUSDA : Bidang Binbangwas Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
41.	046	Data Elektronik	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Dinas KOMINFO Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
42.	047	Sandi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Dinas KOMINFO Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Tata Usaha dan Umum
43.	050	<i>PERENCANAAN DAN EVALUASI</i>				
		meliputi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), Musrenbang, Musrenbangpus antar kementerian, Musrenbangnas, Musrenbangdes	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPPEDALITBANG Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum SETDA : Bag. Pemerintahan PEMDES : Urusan Perencanaan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	050.1	RPJM	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPPEDALITBANG Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum SETDA : Bag. Pemerintahan PEMDES : Urusan Perencanaan
	050.11	RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)				
44.	051	RENSTRA (Rencana Strategis)	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	BAPPEDALITBANG Perangkat Daerah :Sub Bag Perencanaan SETDA : Bag. Organisasi, Bag. Pemerintahan
	051.1	RENSTRA Perangkat Daerah				
45.	052	Program daerah	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPPEDALITBANG Perangkat Daerah :Sub Bag. Perencanaan SETDA : Bagian Orgnisasi, Bagian Pemerintahan PEMDES : Urusan Perencanaan
	052.1	Rencana Kerja Perangkat Paerah				
	052.2	RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)				
	052.3	RKO (Rencana Kerja Operasioal)				
	052.4	RKT (Rencana Kerja Tahunan)				
46.	053	Evaluasi	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPPEDALITBANG Perangkat Daerah :Sub Bag. Perencanaan SETDA : Bag. Organisasi, Bagian Pemerintahan PEMDES : Urusan Perencanaan
	053.1	Evaluasi Rencana Strategis				
	053.2	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				
	053.3	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah				
47.	060	ORGANISASI / KETATALAKSANAAN				
48.	061	Organisasi Pemerintah	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal/eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bag. Organisasi Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum Pemdes : Urusan Tata Usaha & Umum
	061.1	Susunan organisasi dan tata kerja				
	061.2	Tata tertib kantor, jam kerja				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
49.	062	Organisasi Badan Non Pemerintah	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bag. Organisasi Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum Pemdes : Urusan TU & Umum
50.	063	Organisasi Badan Internasional	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bag. Organisasi Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum Pemdes : Urusan TU & Umum
51.	064	Organisasi Semi Pemerintah	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bag. Organisasi Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum Pemdes : Urusan TU & Umum
52.	065	Ketatalaksanaan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bag. Organisasi Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum Pemdes : Urusan TU & Umum
	065.1	Tata naskah dinas				
	065.2	Stempel dinas, stempel jabatan				
	065.3	Papan nama instansi pemerintah / non pemerintah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bag. Umum , Bag. Organisasi, Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum Pemdes : Urusan TU & Umum
	065.4	Alamat kantor, alamat pejabat				
065.5	Ketentuan pakaian dinas dan atribut	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Organisasi Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum Pemdes : Urusan TU dan Umum	

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
53.	066	Tata Hubungan Kerja	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Organisasi Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum Pemdes : Urusan TU dan Umum
	066.1	Telaah Tata Hubungan				
	066.2	Penyusunan				
	066.3	Bimbingan				
54.	067	Standar Pelayanan (SPM, SOP).	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Organisasi Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum Pemdes : Urusan Perencanaan
	067.1	Telaah				
	067.2	Penyusunan				
	067.3	Bimbingan				
55.	068	LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Organisasi Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan Perencanaan
56.	070	<i>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</i>				
57.	071	Riset : meliputi perijinan bagi peneliti, riset design, pembahasan sampai dengan laporan akhir riset	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPPEDALITBANG Perangkat Daerah : Sub.Bag.Perencanaan Pemdes : Urusan TU Umum
58.	072	Pengembangan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPPEDALITBANG; Dinas KOMINFO Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan TU & Umum
	072.1	Krenova (kreativitas dan inovasi masyarakat)				
	072.2	SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi cluster kabupaten /kota, desa inovatif				
	072.3	Pameran produk inovasi/ristek				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	072.4	Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPPEDALITBANG Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan TU Umum
	072.5	BTC (Bisnis Teknologi Center)	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPPEDALITBANG Dinas KOMINFO Perangkat Daerah : Sub.Bag.Perencanaan PEMDES : Urusan TU Umum
59.	073	Kajian	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPPEDALITBANG Perangkat Daerah : Sub.Bag.Perencanaan PEMDES : Urusan TU Umum
	073.1	Kajian strategis / diskusi /Forum Group Discussion (FGD)				
	073.2	Seminar/diseminasi/sosialisasi hasil penelitian				
	073.3	Workshop/lokakarya				
	073.4	Rapat koordinasi/rapat teknis				
60.	074	Kerjasama penelitian	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPPEDALITBANG Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan TU Umum
	074.1	Instansi pemerintah pusat/daerah				
	074.2	Perguruan tinggi negeri/swasta				
	074.3	Lembaga swasta nasional, lembaga swadaya masyarakat				
61.	075	Publikasi Ilmiah	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPPEDALITBANG Perangkat Daerah : Sub.Bag.Perencanaan SETDA : Bag. Umum, Bagian Humas dan Protokol PEMDES : Urusan TU Umum

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
62.	076	Jaringan Penelitian dan Pengembangan.	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPPEDALITBANG Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan TU Umum
63.	080	<i>KONFERENSI/RAPAT KOORDINASI</i>				
64.	081	Gubernur	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Provinsi</i>
65.	082	Bupati / Walikota	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan TU dan Umum
66.	083	Komponen eselon lainnya (termasuk pimpinan Perangkat Daerah)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan TU dan Umum
67.	084	Instansi lainnya (diluar Kementerian Dalam Negeri)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan TU dan Umum
68.	085	Internasional di dalam negeri	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan TU dan Umum
69.	086	Konferensi perangkat desa, sekretaris desa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan TU dan Umum
70.	090	<i>PERJALANAN DINAS</i>				
71.	091	Perjalanan presiden/wakil presiden ke daerah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
72.	092	Perjalanan menteri ke daerah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
73.	093	Perjalanan pejabat tinggi (pejabat eselon I)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
74.	094	Perjalanan PNS, meliputi Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Tugas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan TU dan Umum
75.	095	Perjalanan presiden / wakil presiden ke luar negeri	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
76.	096	Perjalanan menteri ke luar negeri	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
77.	097	Perjalanan tamu asing ke daerah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan TU dan Umum
78.	098	Perjalanan pejabat tinggi ke luar negeri	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan TU dan Umum
79.	099	Perjalanan pegawai ke luar negeri	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Perangkat Daerah : Sub Bag. Umum PEMDES : Urusan TU dan Umum

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
II.	100	PEMERINTAHAN				
1.	110	PEMERINTAHAN PUSAT				
2.	111	Presiden, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan	Biasa/ Terbuka	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	111.1	Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR				
	111.2	Amanat Presiden / amanat kenegaraan				
3.	112	Wakil Presiden, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan serah terima jabatan	Biasa/ Terbuka	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
4.	113	Susunan Kabinet	Biasa/ Terbuka	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	113.1	Reshuffle				
	113.2	Penunjukan Meteri adm interim				
	113.3	Sidang Kabinet, Sidang Dewan Stabilitas Ekonomi				
5.	114	Kementerian Dalam Negeri	Biasa/ Terbuka	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	114.1	Amanat Menteri Dalam Negeri				
6.	115	Kementerian Lainnya	Biasa/ Terbuka	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
7.	116	Lembaga Tinggi Negara	Biasa/ Terbuka	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
8.	117	Lembaga Non Kementerian	Biasa/ Terbuka	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
9.	118	Otonomi Daerah	Biasa/ Terbuka	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
10.	119	Kerjasama antar Kementerian	Biasa/ Terbuka	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
11.	120	<i>PEMERINTAHAN PROVINSI</i>				
	120.01	Kebijakan Pemerintah Provinsi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	<i>Urusan Pemerintah Provinsi</i>
	120.02	Laporan Kinerja Pertanggung-jawaban Gubernur (LKPJ)				
	120.03	Monografi				
12.	120.1	Koordinasi	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	<i>Urusan Pemerintah Provinsi</i>
	120.11	Organisasi Perangkat Daerah				
	120.12	Instansi Vertikal				
	120.13	Kerjasama antar provinsi/daerah, dan luar negeri				
13.	121	Gubernur, meliputi : pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya	Biasa/ Terbuka	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	<i>Urusan Pemerintah Provinsi</i>
14.	122	Wakil Gubernur, meliputi :pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya.	Biasa/ Terbuka	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	<i>Urusan Pemerintah Provinsi</i>
15.	123	Sekretaris Daerah, meliputi : pencalonan, serah terima jabatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	<i>Urusan Pemerintah Provinsi</i>
16.	124	Badan-Badan Pertimbangan Daerah, meliputi : Muspida	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	<i>Urusan Pemerintah Provinsi</i>

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
17.	125	Pembentukan/pemekaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	<i>Urusan Pemerintah Provinsi</i>
	125.1	Pembentukan daerah otonom				
	125.2	Pembentukan wilayah				
	125.3	Perubahan batas wilayah				
	125.4	Pemekaran wilayah				
	125.5	Permasalahan batas wilayah				
	125.6	Pemindahan ibukota provinsi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	<i>Urusan Pemerintah Provinsi</i>
125.7	Pemberian dan penggantian nama kota, daerah, jalan					
18.	126	Pembagian wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	<i>Urusan Pemerintah Provinsi</i>
19.	127	Penyerahan urusan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	<i>Urusan Pemerintah Provinsi</i>
20.	130	PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	Biasa/ Terbuka	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Pemerintahan, Bag. Organisasi PEMDES : Seksi Pemerintahan
21.	131	Bupati meliputi : pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya				
22.	132	Wakil Bupati meliputi : pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya.	Biasa/ Terbuka	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Pemerintahan, Bag. Organisasi PEMDES : Seksi Pemerintahan
23.	133	Sekretaris Daerah, meliputi : pencalonan, serah terima jabatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Pemerintahan, Bag. Organisasi PEMDES : Seksi Pemerintahan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
24.	134	Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah (FKPD)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Tata Pemerintahan, Bag. Organisasi PEMDES : Seksi Pemerintahan
25.	135	Kebijakan pemerintahan kabupaten	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Pemerintahan, Bag. Organisasi PEMDES : Seksi Pemerintahan
	135.1	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)				
	135.2	Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati/Walikota (LKPJ)				
	135.3	Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati /Walikota (AMJ)				
26.	136	Koordinasi	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Pemerintahan PEMDES : Seksi Pemerintahan
	136.1	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)				
	136.2	Instansi vertikal				
	136.3	Kerjasama antar provinsi/daerah, dan luar negeri (sister city)				
27.	137	Kewilayahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Pemerintahan PEMDES : Seksi Pemerintahan
	137.1	Pembentukan daerah otonom				
	137.2	Pembentukan/pembagian wilayah				
	137.3	Perubahan batas wilayah				
	137.4	Pemekaran wilayah				
	137.5	Permasalahan batas wilayah				
	137.6	Pemindahan ibukota kabupaten / kota	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Organisasi PEMDES : Seksi Pemerintahan
	137.7	Pemberian dan penggantian nama kota, daerah, jalan				
28.	138	Penyerahan urusan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Pemerintahan, Bag. Organisasi PEMDES : Seksi Pemerintahan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
29.	139	Pemerintah Kecamatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Pemerintahan KECAMATAN : Seksi Pemerintahan PEMDES : Seksi Pemerintahan
	139.1	Pembentukan Kecamatan				
	139.2	Pemekaran Kecamatan				
	139.3	Perluasan / perubahan batas wilayah kecamatan				
	139.4	Pemindahan Ibukota Kecamatan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Pemerintahan KECAMATAN : Seksi Pemerintahan PEMDES : Seksi Pemerintahan
139.5	Laporan Kecamatan					
30.	140	<i>PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN</i>				
31.	141	Aparatur Desa, meliputi : pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pelantikan, serah terima, penghasilan, dsb	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bag. Pemerintahan DINSOSPERMASDES PEMDES : Urusan TU & Umum, Seksi Pemerintahan
	141.1	Penghasilan dan tunjangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bag. Pemerintahan Badan Keuangan dan Aset Daerah PEMDES : Urusan Keuangan
	141.2	Kesejahteraan selain penghasilan dan tunjangan (hak cuti, jaminan kesehatan, penerimaan lainnya)				
	141.3	Perlindungan hukum terhadap tupoksi	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bag. Pemerintahan DINSOSPERMASDES PEMDES : Urusan TU & Umum, Seksi Pemerintahan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
32	142	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Pemerintahan Badan Keuangan dan Aset Daerah DINSOSPERMASDES PEMDES : Urusan Keuangan
33.	143	Kekayaan desa : bondo desa, tanah bengkok, tanah kas desa, dll.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Pemerintahan Badan Keuangan dan Aset Daerah DINSOSPERMASDES PEMDES : Urusan Keuangan
34.	144	Lembaga Tingkat Desa : BPD, LPMD, LPMK, dll.	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Pemerintahan DINSOSPERMASDES PEMDES : Urusan TU & Umum, Seksi Pemerintahan
35.	145	Administrasi desa / kelurahan :	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Pemerintahan DINSOSPERMASDES PEMDES : Urusan TU & Umum, Urusan Perencanaan, Seksi Pemerintahan
	145.1	Profil desa, monografi, rupa bumi.				
	145.2	Renstra Pemdes / Kelurahan				
	145.3	RPJM Desa				
	145.4	RKP Desa				
145.5	LKPPD (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa), LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa), IPPD (Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)					

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
36.	146	Kewilayahan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Pemerintahan DINSOSPERMASDES PEMDES : Seksi Pemerintahan
	146.1	Pembentukan Desa / Kelurahan				
	146.2	Pemekaran Desa / Kelurahan				
	146.3	Perubahan dan perluasan batas wilayah desa / kelurahan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Pemerintahan DINSOSPERMASDES PEMDES : Seksi Pemerintahan
	146.4	Perubahan nama desa / kelurahan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Pemerintahan DINSOSPERMASDES PEMDES : Seksi Pemerintahan
	146.5	Permasalahan batas desa / kelurahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Tata Pemerintahan DINSOSPERMASDES PEMDES : Seksi Pemerintahan
	146.6	Penyatuan desa / kelurahan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Pemerintahan DINSOSPERMASDES PEMDES : Seksi Pemerintahan
146.7	Penghapusan desa / kelurahan					
37.	147	Dusun, RT, RW	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Pemerintahan DINSOSPERMASDES PEMDES : Seksi Pemerintahan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
38.	148	Kader Desa	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Pemerintahan DINSOSPERMASDES PEMDES : Seksi Pemerintahan
39.	150	<i>LEGISLATIF MPR/DPR/DPD</i>				
40.	151	Keanggotaan MPR	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	151.1	Pencalonan				
	151.2	Pengangkatan dan pengambilan sumpah				
	151.3	Pemberhentian				
	151.31	Recall				
	151.32	Meninggal	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
151.4	Pelanggaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>	
151.5	Pergantian antar waktu					
41.	152	Keanggotaan DPR	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pusat (Sekretariat DPR)</i>
	152.1	Pencalonan				
	152.2	Pengangkatan dan pengambilan sumpah				
	152.3	Pemberhentian				
	152.31	Recall				
	152.32	Meninggal				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	152.4	Pelanggaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pusat (Sekretariat DPR)</i>
	152.5	Pergantian antar waktu				
42.	153	Keanggotaan DPD	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Sekretariat DPR</i>
	153.1	Pencalonan				
	153.2	Pengangkatan dan pengambilan sumpah				
43.	154	Persidangan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Sekretariat DPR</i>
44.	155	Kesejahteraan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Sekretariat DPR</i>
	155.1	Keuangan				
	155.2	Penghargaan				
45.	156	Hak	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Sekretariat DPR</i>
46.	157	Jawaban Pemerintah	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Sekretariat DPR</i>

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
47.	158	Kunjungan lapangan, peninjauan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Sekretariat DPR</i>
48.	159	Kunjungan kerja, study banding, konsultasi	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Sekretariat DPR</i>
49.	160	<i>DPRD PROVINSI</i>				
50.	161	Keanggotaan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Provinsi (Sekretariat DPRD Provinsi)</i>
	161.1	Pencalonan				
	161.2	Pengangkatan dan pengambilan sumpah				
	161.3	Pelanggaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Sekretariat DPRD Provinsi</i>
	161.4	Pemberhentian antar waktu				
	161.41	Meninggal dunia				
	161.42	Mengundurkan diri				
	161.43	Diberhentikan				
	161.5	Alat kelengkapan dewan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Sekretariat DPRD Provinsi</i>
	161.51	Pimpinan				
	161.52	Badan Musyawarah				
	161.53	Komisi				
	161.54	Badan Legislasi Daerah				
161.55	Badan Anggaran					
161.56	Badan Kehormatan					
161.57	Alat kelengkapan lain (Pansus)					

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
52.	162	Persidangan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Sekretariat DPRD Provinsi</i>
	162.1	Rapat-rapat				
	162.11	Rapat paripurna, rapat paripurna istimewa				
	162.12	Rapat pimpinan DPRD				
	162.13	Rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, legislasi, rapat badan kehormatan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Sekretariat DPRD Provinsi</i>
	162.14	Rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat konsultasi				
	162.15	Rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat pemandangan umum				
	162.16	Rapat fraksi				
	162.2	Fraksi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Sekretariat DPRD Provinsi</i>
	162.3	Tata tertib	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Sekretariat DPRD Provinsi</i>
162.4	Kode etik	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Sekretariat DPRD Provinsi</i>	
162.5	Reses	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Sekretariat DPRD Provinsi</i>	

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	162.6	Peninjauan, kunjungan lapangan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Sekretariat DPRD Provinsi</i>
	162.7	Kunjungan kerja, study banding, konsultasi	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Sekretariat DPRD Provinsi</i>
53.	163	Kesejahteraan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Sekretariat DPRD Provinsi</i>
	163.1	Keuangan				
	163.2	Penghargaan				
54.	164	Hak	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Sekretariat DPRD Provinsi</i>
55.	165	Sekretaris DPRD Provinsi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Sekretariat DPRD Provinsi</i>
56.	170	<i>DPRD KABUPATEN / KOTA</i>				
57.	171	Keanggotaan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	Sekretariat DPRD
	171.1	Pencalonan				
	171.2	Pengangkatan dan pengambilan sumpah				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	171.3	Pelanggaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	Sekretariat DPRD
	171.4	Pemberhentian antar waktu	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	Sekretariat DPRD
	171.41	Meninggal dunia				
	171.42	Mengundurkan diri				
	171.43	Diberhentikan				
	171.5	Alat kelengkapan dewan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	Sekretariat DPRD
	171.51	Pimpinan				
	171.52	Badan Musyawarah				
	171.53	Komisi				
	171.54	Badan Legislasi Daerah				
	171.55	Badan Anggaran				
	171.56	Badan Kehormatan				
	171.57	Alat kelengkapan lain (Pansus)				
	172	Persidangan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	Sekretariat DPRD
	172.1	Rapat-rapat	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	Sekretariat DPRD
	172.11	Rapat paripurna, rapat paripurna istimewa				
	172.12	Rapat pimpinan DPRD				
	172.13	Rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, legislasi, rapat badan kehormatan				
	172.14	Rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat konsultasi				
	172.15	Rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat pemandangan umum				
	172.16	Rapat fraksi				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	172.2	Fraksi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	Sekretariat DPRD
	172.3	Tata tertib	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	Sekretariat DPRD
	172.4	Kode etik	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	Sekretariat DPRD
	172.5	Reses	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	Sekretariat DPRD
	172.6	Peninjauan, kunjungan lapangan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	Sekretariat DPRD
	172.7	Kunjungan kerja, study banding, konsultasi	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	Sekretariat DPRD
59.	173	Kesejahteraan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	Sekretariat DPRD
	173.1	Keuangan				
	173.2	Penghargaan				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
60.	174	Hak	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	Sekretariat DPRD
61.	175	Sekretaris DPRD Kabupaten	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	Sekretariat DPRD
62.	180	<i>HUKUM</i>				
	180.1	Konstitusi	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	180.11	Dasar Negara	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	180.12	Undang-Undang Dasar	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	180.13	Undang-Undang	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	180.14	Peraturan Pemerintah	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	180.15	Keppres/ Perpres/ Inpres	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	180.16	Kepmen/ Permen/ Inmen	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	180.17	Perundangan tingkat provinsi meliputi : Perda, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	SETDA Provinsi : Biro Hukum, Biro Pemerintahan
	180.18	Perundangan tingkat kabupaten meliputi : Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, <i>kecuali</i> Keputusan Bupati <i>Terbatas</i>	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	SETDA : Bag. Hukum, Bag. Pemerintahan
	180.19	Perundangan tingkat desa meliputi: peraturan desa, peraturan kepala desa, <i>kecuali</i> keputusan kepala desa <i>Terbatas</i>	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bag. Hukum, Bag. Pemerintahan PEMDES : Seksi Pemerintahan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	180.2	Tap MPR	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	180.3	Konvensi	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	SETDA Provinsi : Biro Hukum, Biro Pemerintahan
63.	181	Perdata	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bag. Hukum, PEMDES : Seksi Pemerintahan
	181.1	Tanah				
	181.2	Rumah				
	181.3	Utang/ piutang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bag. Hukum, PEMDES : Seksi Pemerintahan
	181.31	Gadai				
	181.32	Hipotik				
	181.4	Notariat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bag. Hukum, PEMDES : Seksi Pemerintahan
64.	182	Pidana	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bag. Hukum PEMDES : Seksi Pemerintahan
	182.1	Tindak Pidana Umum				
	182.2	Tindak Pidana Khusus				
65.	183	Peradilan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	SETDA : Bag. Hukum PEMDES : Seksi Pemerintahan
	183.1	Jenis-jenis peradilan				
	183.11	Peradilan Umum				
	183.12	Peradilan Agama Islam				
	183.13	Peradilan Negeri				
	183.14	Peradilan Tata Usaha Negara				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	183.15	Peradilan Tindak Pidana Korupsi	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	SETDA : Bag. Hukum PEMDES : Seksi Pemerintahan
	183.16	Peradilan Hak Asasi Manusia				
	183.17	Mahkamah Konstitusi				
	183.18	Komisi Yudisial				
	183.19	Ombustmen				
	183.2	Upaya Hukum	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bag. Hukum, PEMDES : Seksi Pemerintahan
	183.21	Banding				
	183.22	Kasasi				
	183.23	Derden Verzet				
	183.24	Peninjauan Kembali				
	183.3	Eksekusi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bag. Hukum, PEMDES : Seksi Pemerintahan
	183.4	Pembinaan Hukum	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bag. Hukum, PEMDES : Seksi Pemerintahan
	183.41	Pembinaan Kesadaran Hukum (KADARKUM)				
	183.5	Bantuan Hukum	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bag. Hukum, PEMDES : Seksi Pemerintahan
	183.51	Lembaga Bantuan Hukum				
66.	184	Hukum Internasional	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
67.	185	Imigrasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
69.	187	Kejaksaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bag. Hukum, PEMDES : Seksi Pemerintahan
	187.1	Penuntutan Umum				
	187.2	Penuntutan Khusus				
70.	188	Hukum Adat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bag. Hukum, PEMDES : Seksi Pemerintahan
	188.1	Tokoh adat / masyarakat				
71.	190	<i>HUBUNGAN LUAR NEGERI</i>				
72.	191	Perwakilan Asing	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
73.	192	Tamu Negara	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
74.	193	Kerjasama dengan Negara Asing	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	SETDA : Bagian Pemerintahan
	193.1	Kerjasama Bilateral				
	193.2	Kerjasama Multilateral				
75.	194	Perwakilan R.I di luar negeri	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
76.	195	PBB	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
77.	196	Laporan Luar Negeri	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
III	200	POLITIK				
1.	201	Perencanaan dan Program Pembinaan Politik Dalam Negeri	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL SETDA : Bagian Pemerintahan PEMDES : Seksi Pemerintahan
2.	202	Pembinaan dan pementapan ideologi negara	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL SETDA : Bagian Pemerintahan PEMDES : Seksi Pemerintahan
3.	203	Hasil evaluasi dan pengawasan pembinaan Ipoleksosbud, Kamtibmas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL SETDA : Bagian Pemerintahan PEMDES : Seksi Pemerintahan
4.	210	<i>KEPARTAIAN</i>				
5.	211	Partai Politik (PARPOL)	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL PEMDES : Seksi Kesra
	211.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik				
	211.2	Program kerja, data kegiatan partai politik				
	211.3	Pembinaan partai politik				
	211.4	Hasil Munas/ Musda partai politik				
	211.5	Struktur/kepengurusan, pengkaderan dan keanggotaan partai politik				
	211.6	Data inventaris dan keuangan partai politik				
6.	212	Partai / organisasi terlarang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL PEMDES : Seksi Kesra
	212.1	Keputusan pembubaran partai/organisasi terlarang				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	212.2	Daftar dan data pengurus anggota partai/ organisasi terlarang	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL PEMDES : Seksi Kesra
	212.3	Ijin meninggalkan tempat/ domisili bagi anggota partai/ organisasi terlarang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL PEMDES : Seksi Kesra
	212.4	Daftar berkala mengenai keadaan anggota partai/ organisasi terlarang	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL PEMDES : Seksi Kesra
	212.5	Laporan umum mengenai keadaan anggota partai/ organisasi terlarang				
7.	213	Forum komunikasi lintas antar partai politik	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL PEMDES : Seksi Kesra
8.	220	<i>ORGANISASI KEMASYARAKATAN</i>				
9.	221	Pembentukan organisasi	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL PEMDES : Seksi Kesra
	221.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga				
	221.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi				
	221.3	Program kerja organisasi	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL PEMDES : Seksi Kesra
	221.4	Munas/ Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota				
221.5	Musyawarah Desa/ Musyawarah Kelurahan					
10.	222	Pembinaan organisasi	Biasa/	1. Penentu kebijakan		

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	222.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya	Terbuka	2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BAKESBANGPOL PEMDES : Seksi Kesra
	222.2	Daftar inventaris kekayaan organisasi				
11.	223	Pemantauan orang asing dan lembaga asing	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BAKESBANGPOL PEMDES : Seksi Kesra
12.	230	<i>ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL</i>				
13.	231	Pembentukan organisasi	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BAKESBANGPOL PEMDES : Seksi Kesra
	231.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga				
	231.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi				
	231.3	Program kerja organisasi				
	231.4	Munas/ Musda provinsi dan kabupaten/ kota				
14.	232	Pembinaan organisasi	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BAKESBANGPOL PEMDES : Seksi Kesra
	232.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya				
15.	233	Daftar inventaris kekayaan organisasi	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BAKESBANGPOL PEMDES : Seksi Kesra
16.	240	<i>ORGANISASI PEMUDA</i>				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
17.	241	Pembentukan organisasi	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL PEMDES : Seksi Kesra
	241.1	Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga				
	241.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi				
	241.3	Program kerja organisasi				
	241.4	Munas/ musda provinsi dan kabupaten/ kota				
18.	242	Pembinaan organisasi	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL PEMDES : Seksi Kesra
	242.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya				
19.	243	Daftar inventaris kekayaan organisasi	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL PEMDES : Seksi Kesra
20.	250	<i>ORGANISASI WANITA</i>				
21.	251	Pembentukan organisasi	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL PEMDES : Seksi Kesra
	251.1	Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga				
	251.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi				
	251.3	Program kerja organisasi				
	251.4	Munas / Musda provinsi dan kabupaten/ kota				
22.	252	Pembinaan organisasi	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL PEMDES : Seksi Kesra
	252.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
23.	253	Daftar inventaris kekayaan organisasi	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BAKESBANGPOL PEMDES : Seksi Kesra
24.	260	<i>ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN</i>				
25.	261	Pembentukan organisasi	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BAKESBANGPOL PEMDES : Seksi Kesra
	261.1	Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga				
	261.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi				
	261.3	Program kerja organisasi				
	261.4	Munas / Musda provinsi dan kabupaten/ kota				
26.	262	Pembinaan organisasi	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BAKESBANGPOL PEMDES : Seksi Kesra
	262.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya				
27.	263	Daftar inventaris kekayaan organisasi	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BAKESBANGPOL PEMDES : Seksi Kesra
28.	270	<i>PEMILU (PEMILIHAN UMUM), PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH)</i>				
29.	271	Pencalonan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BAKESBANGPOL, KPU, BAWASLU SETDA : Bagian Pemerintahan PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
30.	272	Nomor urut/ tanda gambar	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL, KPU, BAWASLU SETDA : Bagian Pemerintahan PEMDES : Seksi Kesra
31.	273	Kampanye	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL, KPU, BAWASLU SETDA : Bagian Pemerintahan PEMDES : Seksi Kesra
	273.1	Dana kampanye				
32.	274	Petugas pemilu	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL, KPU, BAWASLU SETDA : Bagian Pemerintahan PEMDES : Seksi Kesra
33.	275	Pemilih/ daftar pemilih	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL, KPU, BAWASLU SETDA : Bagian Pemerintahan PEMDES : Seksi Kesra
34.	276	Sarana (termasuk, kotak suara)	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL, KPU, BAWASLU SETDA : Bagian Pemerintahan PEMDES : Seksi Kesra
	276.1	TPS				
	276.2	Kendaraan				
	276.3	Surat suara				
	276.4	Kotak suara				
35.	277	Pemungutan suara/ perhitungan suara	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL, KPU, BAWASLU SETDA : Bagian Pemerintahan PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
36.	278	Hasil Pemilu	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL, KPU, BAWASLU SETDA : Bagian Pemerintahan PEMDES : Seksi Kesra
	278.1	Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif				
	278.2	Penetapan pemenang pilkada				
37.	279	KPU/ KPUD				BAKESBANGPOL, KPU, BAWASLU SETDA : Bagian Pemerintahan PEMDES : Seksi Kesra
38.	280	<i>PENGAWASAN PEMILU/ PILKADA</i>				
39.	281	Pemantauan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL , KPU, BAWASLU SETDA : Bagian Pemerintahan PEMDES : Seksi Pemerintahan
40.	282	Pelanggaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL, KPU, BAWASLU SETDA : Bagian Pemerintahan PEMDES : Seksi Pemerintahan
41.	283	Sengketa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL, KPU, BAWASLU SETDA : Bagian Pemerintahan PEMDES : Seksi Pemerintahan
42.	284	Panwaslu	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAKESBANGPOL, KPU, BAWASLU SETDA : Bagian Pemerintahan PEMDES : Seksi Pemerintahan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
IV	300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM				
1.	300.1	Kebijakan pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
	300.2	Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan				
	300.3	Pencegahan dan penanggulangan gangguan / ancaman keamanan / ketertiban umum	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
2.	301	Koordinasi dan kerjasama keamanan dan ketertiban umum	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
3.	302	Pengawasan ketentraman dan ketertiban umum termasuk ketertiban masyarakat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
4.	303	Penegakan pelaksanaan perda dan perbup	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
5.	304	Pembinaan/penyuluhan pelanggaran perda dan perbup	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6.	305	Patroli wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
7.	306	Laporan kunjungan VIP, VVIP, Tamu asing	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
	306.1	Pengamanan				
	306.2	Pengawalan				
8.	307	Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
9.	310	<i>PERTAHANAN</i>				
10.	311	Darat	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
11.	312	Laut	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
12.	313	Udara	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
13.	314	Ketahanan bangsa	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
14.	315	Ketahanan ekonomi	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
15.	316	Ketahanan seni dan budaya, agama dan kemasyarakatan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
16.	320	<i>KEMILITERAN / TNI</i>				
17.	321	Latihan Militer	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
18.	322	Wajib Militer	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
19.	323	Operasi Militer	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas sertapenegakhukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
20.	324	Kekaryaannya TNI	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
21.	325	Kemanunggalan TNI dengan rakyat	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
22.	330	<i>KEAMANAN</i>				
23.	331	Kepolisian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
	331.1	Polisi pamong praja				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
24.	332	Huru-hara/ demonstrasi/ unjuk rasa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
25.	333	Senjata api/ tajam	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
26.	334	Bahan peledak	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
27.	335	Perjudian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
28.	336	Surat-surat kaleng	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
29.	337	Pengaduan masyarakat	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
30.	338	Himbauan/ larangan	Biasa/ Terbuka	1. Penent kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
31.	340	<i>PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)</i>				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	340.1	Kebijaksanaan pemerintah mengenai pembentukan Linmas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
32.	341	Pembinaan dan diklat	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
	341.1	Pengangkatan / pemberhentian anggota Linmas				
	341.2	Pendidikan / latihan Linmas				
	341.3	Pelatihan PAM swakarsa				
	341.4	Pendidikan / latihan MENWA				
33.	342	Pengerahan dan pengendalian Linmas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
34.	343	Kesejahteraan bagi anggota Linmas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
	343.1	Pemberian tali asih bagi anggota Linmas				
	343.2	Bantuan modal usaha bagi anggota Linmas				
	343.3	Santunan uang bagi anggota Linmas				
	343.4	Penghargaan bagi anggota Linmas				
35.	344	Data Linmas, MENWA, PAM Swakarta	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
	344.1	Linmas Lanjut Usia				
36.	345	Orientasi kesadaran bela negara	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
37.	346	Kegiatan Linmas	Biasa/ Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
38.	350	<i>KEJAHATAN</i>				
39.	351	Makar/ pemberontakan/ terorisme	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
40.	352	Pembunuhan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
41.	353	Penganiayaan/ pencurian/ perampasan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
42.	354	Subversi/ penyeludupan/ narkotika	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
43.	355	Penipuan dan pemalsuan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
44.	356	Korupsi/ penyelewengan/ penyalahgunaan jabatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
45.	357	Kekerasan pada perempuan dan anak (termasuk KDRT)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan,	Memiliki dampak yang mengganggu	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
	357.1	Pelaporan				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	357.2	Penanganan korban		pengawas serta penegak hukum	kinerja Pemda dan Pemdes	
46.	358	Kenakalan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
47.	359	Kejahatan lainnya (trafficking, hipnotis, bunuh diri dll)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SATPOL PP PEMDES : Seksi Pemerintahan
48.	360	<i>BENCANA</i>				
49.	361	Pemetaan daerah bencana	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BPBD PEMDES : Seksi Kesra
50.	362	Kawasan rawan bencana	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BPBD PEMDES : Seksi Kesra
51.	363	Jenis bencana	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BPBD PEMDES : Seksi Kesra
	363.1	Banjir, tanah longsor				
	363.2	Gunung berapi, gempa, tsunami				
	363.3	Angin topan				
	363.4	Kebakaran				
363.5	Kekeringan					
52.	364	Kesiapsiagaan bencana (meliputi: pelatihan, posko bencana)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BPBD PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
53.	365	Penanggulangan bencana	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BPBD PEMDES : Seksi Kesra
54.	370	<i>KECELAKAAN</i>				
55.	371	Kecelakaan Darat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BPBD PEMDES : Seksi Pemerintahan
56.	372	Kecelakaan Udara	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BPBD PEMDES : Seksi Pemerintahan
57.	373	Kecelakaan Laut	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BPBD PEMDES : Seksi Pemerintahan
58.	374	Investigasi / penyelidikan kecelakaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BPBD PEMDES : Seksi Pemerintahan
59.	375	Latihan ketrampilan penanganan kecelakaan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BPBD PEMDES : Seksi Kesra
60.	376	Asuransi kecelakaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan,	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BPBD PEMDES : Seksi Pemerintahan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				pengawas serta penegak hukum		
61.	380	<i>PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI</i>				
62.	381	Perencanaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BPBD PEMDES : Seksi Pemerintahan
	381.1	Perencanaan teknis				
	381.2	Rekomendasi				
63.	382	Bantuan bencana	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BPBD PEMDES : Seksi Kesra
64.	383	Penanggulangan bencana dengan pihak lain	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BPBD PEMDES : Seksi Kesra
65.	384	Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BPBD PEMDES : Seksi Kesra
66.	385	Pusat pengendalian operasional (PUSDALOPS)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BPBD PEMDES : Seksi Pemerintahan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
67.	386	Kunjungan lapangan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BPBD PEMDES : Seksi Kesra
68.	387	Relawan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BPBD PEMDES : Seksi Kesra
69.	388	Laporan bencana	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BPBD PEMDES : Seksi Kesra
70.	390	<i>KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN</i>				
71.	391	Instansi Pemerintah Pusat	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BPBD PEMDES : Seksi Kesra
72.	392	Instansi Pemerintah di daerah	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BPBD PEMDES : Seksi Kesra
73.	393	Lembaga Internasional	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	BPBD PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	kinerja Pemda dan Pemdes	
74.	394	Lembaga non pemerintah	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BPBD PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
V	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT				
1.	401	Kebijakan dan program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINSOSPERMASDES SETDA : Bagian Kesra PEMDES : Seksi Kesra
2.	410	PEMBANGUNAN DESA / KELURAHAN				
3.	411	Gotong royong	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINSOSPERMASDES DPPKBP3A SETDA : Bagian Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	411.1	Swadaya gotong royong				
	411.2	Lembaga Sosial Desa				
	411.3	Latihan Kerja Masyarakat				
	411.4	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)				
	411.5	Penyuluhan masyarakat desa				
4.	412	Perekonomian desa/ kelurahan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINSOSPERMASDES SETDA : Bagian Pemerintahan PEMDES : Seksi Kesra
	412.1	Produksi desa				
	412.2	Pembiayaan pembangunan desa				
	412.21	Inventarisasi data				
	412.22	Pelaksanaan dan perkembangan pembangunan desa				
	412.23	Bantuan pembangunan desa				
	412.3	Koperasi Desa	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINSOSPERMASDES SETDA : Bagian Pemerintahan PEMDES : Seksi Kesra
412.4	Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINSOSPERMASDES SETDA : Bag. Pemerintahan PEMDES : Seksi Pemerintahan	

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
5.	413	Sarana dan prasarana desa/ kelurahan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINSOSPERMASDES SETDA : Bagian Pemerintahan PEMDES : Seksi Kesra
	413.1	Pemukiman penduduk				
	413.2	Perbaikan kampung				
	413.3	Pemugaran perumahan dan lingkungan desa				
	413.4	Sumber daya desa				
6.	414	Pengembangan desa/ kelurahan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINSOSPERMASDES SETDA : Bagian Pemerintahan PEMDES : Seksi Kesra
	414.1	Pembinaan				
	414.2	Perlombaan				
7.	415	Kerjasama	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINSOSPERMASDES SETDA : Bag. Pemerintahan PEMDES : Seksi Pemerintahan
	415.1	Perguruan Tinggi				
	415.2	Kementerian / Lembaga Pemerintah				
	415.3	Lembaga lainnya				
8.	416	Teknologi Pedesaan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINSOSPERMASDES SETDA : Bagian Pemerintahan PEMDES : Seksi Kesra
9.	420	<i>PENDIDIKAN</i>				
	420.1	Kebijakan dan program pemerintah untuk pendidikan (termasuk kejar paket A,B,C, pendidikan keluarga, pendidikan anak putus sekolah)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS PENDIDIKAN DINPORABUDPAR SETDA : Bag. Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	420.2	Pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme, dsb				
	420.3	Pendidikan kemasyarakatan				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10.	421	Sekolah (termasuk akreditasi, regrouping, perijinan pendirian, ijin operasional lembaga)	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS PENDIDIKAN SETDA : Bag. Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	421.1	Pra sekolah (PAUD, Playgroup)				
	421.2	Sekolah Dasar				
	421.3	Sekolah Menengah				
	421.4	Sekolah Kejuruan				
	421.5	Sekolah Pendidikan Luar Biasa				
	421.6	Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi, Akademi, Universitas, dll)				
	421.7	Pendidikan Luar Sekolah / pemberantasan buta huruf				
421.8	Kegiatan sekolah meliputi Dies Natalis, Lustrum					
11.	422	Administrasi sekolah	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS PENDIDIKAN SETDA : Bag. Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	422.1	Persyaratan masuk sekolah, testing, ujian, OSPEK (MOS)				
	422.2	Kalender pendidikan				
	422.3	Uang sekolah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS PENDIDIKAN, SETDA : Bag. Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	422.4	Beasiswa dan penghargaan siswa berprestasi				
	422.5	Bantuan pendidikan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), Program Indonesia Pintar (PIP)				
422.6	Ijazah, Sertifikat					
12.	423	Metode belajar	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS PENDIDIKAN PEMDES : Seksi Kesra
	423.1	Kurikulum				
	423.2	Kuliah, Diskusi				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	423.3	Ujian, ulangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS PENDIDIKAN PEMDES : Seksi Kesra
	423.4	E-Learning	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS PENDIDIKAN SETDA : Bag. Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	423.5	Ceramah, simposium, seminar				
	423.6	Karya tulis, karya ilmiah				
	423.7	Kuliah lapangan, KKN, magang / praktek / PKL /PSG				
	423.8	Sistem Informasi Pendidikan				
	423.9	Kegiatan pelajar diantaranya orientasi siswa, darmawisata, widyawisata, lomba-lomba (LKS, olimpiade sains, olimpiade olahraga dan sains), pelajar teladan, pertukaran pelajar				
13.	424	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS PENDIDIKAN PEMDES : Seksi Kesra
	424.1	Pertukaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Keluar Negeri				
	424.2	K3S, MGMP, MGPD				
	424.3	Sertifikasi guru				
14.	425	Sarana pendidikan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS PENDIDIKAN SETDA : Bag. Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	425.1	Bangunan pendidikan				
	425.11	Gedung sekolah				
	425.12	Kampus				
	425.13	Pusat Kegiatan				
	425.14	Perpustakaan				
	425.15	Laboratorium				
	425.2	Buku	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS PENDIDIKAN PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	425.3	Perlengkapan pendidikan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS PENDIDIKAN PEMDES : Seksi Kesra
15.	426	<i>KEOLAHRAGAAN</i>				
	426.1	Pembinaan keolahragaan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS PENDIDIKAN DINPORABUDPAR SETDA : Bag. Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	426.11	Olahraga Prestasi (Porprov, PON, Kejurnas, Sea Games, Olympiade)				
	426.12	Olahraga Pendidikan (POPDA, Porseni, dll)				
	426.13	Olahraga rekreasi/ massal (senam, sepeda santai, olahraga tradisional, dll)				
	426.14	Iptek dan industri olahraga				
	426.2	Kemitraan olahraga	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS PENDIDIKAN DINPORABUDPAR SETDA : Bag. Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	426.3	Sarana Prasarana Keolahragaan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS PENDIDIKAN DIPORABUDPAR SETDA : Bag. Kesra PEMDES : Seksi Kesra
16.	427	<i>KEPEMUDAAN</i>				
	427.1	Pertukaran pemuda	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS PENDIDIKAN DINPORABUDPAR SETDA : Bag. Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	427.2	Paskibraka				
	427.3	Pemberdayaan pemuda (Karang Taruna)				
	427.4	Kemitraan pemuda				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
17.	428	Kepramukaan/ kepanduan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS PENDIDIKAN PEMDES : Seksi Kesra
18.	430	<i>KEBUDAYAAN</i>				
	430.1	Kebijakan dan program pemerintah untuk kebudayaan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPORABUDPAR DINAS PENDIDIKAN SETDA : Bag. Kesra, PEMDES : Seksi Kesra
	430.2	Pembinaan Kebudayaan				
19.	431	Kesenian	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPORABUDPAR DINAS PENDIDIKAN SETDA : Bag. Kesra, PEMDES : Seksi Kesra
	431.1	Cabang Kesenian (seni pewayangan, seni tari, seni musik, seni rupa, seni lukis, perfilman dll)				
	431.2	Sarana Prasarana Kesenian				
	431.3	Festival, pentas seni				
20.	432	Kepurbakalaan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPORABUDPAR DINAS PENDIDIKAN SETDA : Bag. Kesra, PEMDES : Seksi Kesra
	432.1	Museum				
	432.2	Peninggalan kuno (benda, candi, dll)				
21.	433	Sejarah	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPORABUDPAR DINAS PENDIDIKAN SETDA : Bag. Kesra, PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
22.	434	Bahasa	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPORABUDPAR DINAS PENDIDIKAN SETDA : Bag. Kesra, PEMDES : Seksi Kesra
23.	435	Penghayat Kepercayaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPORABUDPAR DINAS PENDIDIKAN SETDA : Bag. Kesra, PEMDES : Seksi Kesra
24.	436	Kegiatan Adat / Tradisi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPORABUDPAR DINAS PENDIDIKAN SETDA : Bag. Kesra, PEMDES : Seksi Kesra
25.	440	<i>KESEHATAN</i>				
	440.1	Kebijakan dan program pemerintah untuk kesehatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD, SETDA : Bag. Kesra PEMDES : Seksi Kesra
26.	441	Pembinaan dan pelayanan kesehatan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD SETDA : Bag. Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	441.1	Gigi				
	441.2	Mata				
	441.3	Jiwa				
	441.4	Kanker				
	441.5	UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)				
	441.6	Perawatan				
	441.7	Kesehatan masyarakat meliputi PKM, pemberdayaan kesehatan masyarakat melalui media PKK, Posyandu, dsb				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	441.8	Kesehatan keluarga (termasuk kesehatan reproduksi, ibu, anak, dan remaja)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD, SETDA : Bag. Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	441.9	Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal, dll.)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD SETDA : Bag. Kesra PEMDES : Seksi Kesra
27.	442	Obat-obatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD SETDA : Bag. Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	442.1	Pengadaan				
	442.2	Pemeriksaan				
	442.3	Penyimpanan				
	442.4	Distribusi obat				
	442.5	Pengawasan obat				
	442.51	Obat generik				
	442.52	Obat terlarang				
442.53	Pemalsuan obat					
28.	443	Pemberantasan dan pencegahan penyakit	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD SETDA : Bag. Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	443.1	Pencegahan penyakit				
	443.2	Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P2ML)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD SETDA : Bag. Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	443.21	Kusta				
	443.22	Kelamin, HIV, AIDS, IMS				
	443.23	Frambusia				
	443.24	T.B.C				
	443.25	Kholera				
443.26	SARS, dan jenis penyakit lainnya					

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	443.3	Pemberantasan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD SETDA : Bag. Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	443.31	Malaria				
	443.32	Dengue Haemorrhagie Fever (DHF), DBD				
	443.33	Filaria				
	443.34	Serangga				
	443.35	Rabies				
	443.36	Antrak				
	443.37	Leptosirosis				
	443.38	Chikungunya				
	443.39	Penyakit lainnya				
	443.4	Pemberantasan dan pencegahan penyakit tidak menular	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD SETDA : Bag. Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	443.41	A. pektoris				
	443.42	IMA (Irama Astcmika Akut)				
	443.43	Hipertensi				
	443.44	Stroke				
	443.45	Diabetes Melitus				
	443.46	Pemberantasan dan pencegahan penyakit CA.Serviks				
	443.47	Pemberantasan dan pencegahan penyakit CA.Mammae				
	443.48	Pemberantasan dan pencegahan penyakit CA.Hepar				
	443.49	Pemberantasan dan pencegahan penyakit CA Paru, dan penyakit lainnya				
	443.5	Epidemiology dan Karantina (Epidka)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD SETDA : Bag. Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	443.51	Imunisasi				
	443.52	Surveilanse				
	443.53	Pestisida				
	443.54	Pencemaran udara				
	443.55	Jamban keluarga				
	443.56	Kesehatan institusi				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	443.6	Higiene sanitasi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD SETDA : Bag. Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	443.61	Tempat-tempat pembuatan dan penjualan makanan minuman (TPPMM), jasaboga				
	443.62	Sarana air minum				
	443.63	Pestisida, insektisida				
	443.64	Pencemaran				
	443.65	Jamban keluarga, sanitasi rumah tangga				
	443.66	Kesehatan institusi, misal : Poskestren, sanitasi masjid dll				
	443.67	Higiene sanitasi CA.Mammae				
	443.68	Higiene sanitasi CA.Hepar				
	443.69	Higiene sanitasi CA.Paru				
	443.7	Kejadian khusus	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD SETDA : Bag. Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	443.71	Dekopensatiokordosis (serangan jantung)				
	443.72	Asma				
	443.73	Psikosis				
	443.74	PPOM				
	443.75	Kecelakaan lalulintas				
	443.76	Kejadian Luar Biasa (KLB)				
29.	444	Gizi dan pengawasan makanan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD SETDA : Bag. Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	444.1	Kekurangan makanan				
	444.2	Bahaya kelaparan, busung lapar, gizi buruk				
	444.3	Keracunan makanan				
	444.4	Menu makanan rakyat				
	444.5	Gondok Endemik (GAKI)				
30.	445	RSU, RSJ, RS Khusus	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	445.1	Pelayanan medis (termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisi pasien, visum)				
	445.11	Rawat inap				
	445.12	Rawat jalan				
	445.13	IGD				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	445.14	IBS	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	445.15	ICU				
	445.16	MCU (Medical Check Up)				
	445.2	Penunjang medis	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	445.21	Farmasi				
	445.22	Rekam medik	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	445.23	Radiologi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	445.24	Gizi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	445.25	Laboratorium Klinik	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	445.26	Laboratorium Patologi Anatomi, Forensik	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	445.27	Bank Darah Rumah Sakit	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	445.3	Penunjang Non Medis	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	445.31	IPSR (Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit)				
	445.32	IT (Instalasi Teknologi Informatika)				
	445.33	ITK (Instalasi Transportasi dan Keamanan)				
	445.34	Sanitasi Rumah Sakit				
	445.35	CSSD / Laundry				
	445.4	Keperawatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	445.5	Komite	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	445.51	Komite Medis				
	445.52	Komite Keperawatan				
	445.53	Komite Tenaga Penunjang				
	445.54	Komite Farmasi dan Terapi				
	445.55	Komite Hukum dan Etik				
	445.56	Komite Karyawan				
	445.6	SPI (Satuan Pengawas Internal)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	445.7	Mutu Rumah Sakit	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	445.71	Akreditasi				
	445.72	ISO				
	445.73	PSBH (Problem Solving for Better Hospital)				
	445.74	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	445.8	IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	445.9	Promosi layanan kesehatan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	445.91	CSR (Corporate Social Responsibility)				
	445.92	Komplain Pelanggan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	445.10	Kasus Hukum Rumah Sakit	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
31.	446	Tenaga Medis	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	446.1	Perencanaan Tenaga Medis				
	446.2	Pendayagunaan Tenaga Medis	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	446.21	Perijinan untuk Tenaga Medis	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	446.22	Kegiatan Bhakti Sosial Tenaga Medis	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	446.23	TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	446.24	TKHD (Tenaga Kesehatan Haji Daerah)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	446.3	Diklat Tenaga Kesehatan/ Medis	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	446.4	Diklat Tenaga Kesehatan/ Para Medis	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	446.5	Pendidikan di bidang Kesehatan termasuk pendidikan spesialis	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
32.	447	Peralatan kesehatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	447.1	Standarisasi				
	447.2	Perijinan berkaitan dengan alat kesehatan				
33.	448	Pengobatan Alternatif	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	448.1	Pijat				
	448.2	Akupunktur				
	448.3	Jamu dan herbal				
34.	449	Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan (termasuk Polindes dan Forum Kesehatan Desa)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN, RSUD PEMDES : Seksi Kesra
	449.1	Puskesmas dan Puskesmas Keliling				
	449.2	Poliklinik, Balai Kesehatan				
	449.3	Rumah Bersalin				
	449.4	Posyandu				
	449.5	Laboratorium Kesehatan				
	449.6	Apotik				
	449.7	Sanatorium kesehatan				
	449.8	Public Safety Center (PSC)				
35.	450	AGAMA				
	450.1	Kebijakan dan program pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan bidang keagamaan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	450.2	Bantuan dibidang keagamaan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Kesra PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
36.	451	Islam	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	451.1	Peribadatan				
	451.11	Solat				
	451.12	Zakat, Infaq, Shodaqoh,				
	451.13	Puasa				
	451.14	Umroh dan Haji				
	451.2	Rumah Ibadah (Masjid, Mushola, Surau)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	451.3	Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i, Ustad/Ustadzah)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	451.4	Pendidikan Agama	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS PENDIDIKAN SETDA : Bagian Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	451.41	Pendidikan Tinggi Agama				
	451.42	Menengah, MTs, MA				
	451.43	Dasar, Pra Sekolah, Madrasah Ibtidaiyah/MI				
	451.44	Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ/Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dll)				
	451.45	Dakwah (Pengajian, MTQ)				
451.5	Wakaf	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Kesra PEMDES : Seksi Kesra	
451.6	Mazhab Agama Islam					
451.7	Organisasi keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hisab Rukyat, dll)					

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
37.	452	Kristen Protestan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	452.1	Peribadatan				
	452.2	Rumah Ibadah (Gereja, dll.)				
	452.3	Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta, Domine)				
	452.4	Mazhab, aliran				
	452.5	Organisasi Keagamaan Bukan Politik				
38.	453	Katolik	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	453.1	Peribadatan				
	453.2	Rumah Ibadah, (Gereja, Kaple dll)				
	453.3	Tokoh Agama, Rohaniawan (Pastur)				
	453.4	Mazhab, aliran				
	453.5	Organisasi Keagamaan Bukan Politik				
39.	454	Hindu	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	454.1	Peribadatan				
	454.2	Rumah Ibadah (Pura, dll)				
	454.3	Tokoh Agama, Rohaniawan				
	454.4	Mazhab, aliran				
	454.5	Organisasi Keagamaan Bukan Politik				
40.	455	Budha	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	455.1	Peribadatan				
	455.2	Rumah Ibadah, (Candi, Vihara dll)				
	455.3	Tokoh Agama, Rohaniawan				
	455.4	Mazhab, aliran				
	455.5	Organisasi Keagamaan Bukan Politik				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
41.	456	Kong Hu Cu	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	456.1	Peribadatan				
	456.2	Rumah Ibadah, (Klenteng, dll)				
	456.3	Tokoh Agama, Rohaniawan				
	456.4	Mazhab, aliran				
	456.5	Organisasi keagamaan bukan politik				
42.	460	<i>SOSIAL</i>				
43.	461	Rehabilitasi Penyandang Cacat	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINSOSPERMASDES SETDA : Bagian Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	461.1	Cacat Ganda				
	461.2	Cacat Fisik				
	461.3	Cacat Mental				
44.	462	Rehabilitasi Sosial	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINSOSPERMASDES SETDA : Bagian Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	462.1	Gelandangan/orang terlantar, anak jalanan				
	462.2	Pengemis				
	462.3	Tunas Susila				
	462.4	Anak Nakal				
	462.5	Tuna Wisma				
45.	463	Kesejahteraan anak dan keluarga	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPPKBP3A SETDA : Bagian Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	463.1	Kesejahteraan Anak				
	463.11	Pengarusutamaan Hak-Hak Anak (PUHA)				
	463.12	Perlindungan Anak				
	463.13	Anak Asuh				
	463.2	Kualitas Hidup Perempuan				
	463.21	Perlindungan Perempuan				
	463.22	Ibu teladan				
	463.23	Pengarusutamaan Gender (PUG)				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
46.	464	Keperintisan dan kepahlawanan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINSOSPERMASDES SETDA : Bagian Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	464.1	Pahlawan meliputi Penghargaan kepada pahlawan, tunjangan pada pahlawan dan jandanya				
	464.2	Perintis kemerdekaan meliputi pembinaan, penghargaan dan tunjangan kepada perintis kemerdekaan				
	464.3	Cacat Veteran				
47.	465	Kesejahteraan Sosial	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINSOSPERMASDES SETDA : Bagian Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	465.1	Lanjut Usia				
	465.2	Korban kekacauan, pengungsian, rehabilitasi				
	465.3	Masyarakat miskin: Rastra, BLT, dll				
	465.4	Potensi sumber kesejahteraan sosial (meliputi : Pekerja Sosial Masyarakat / PSM, Penyuluh Sosial, TKSK, Tagana, LKS/Orsos, Saka Bina Sosial, LK3, WKSBM, RSBM).				
48.	466	Sumbangan sosial	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINSOSPERMASDES SETDA : Bagian Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	466.1	Korban bencana				
	466.11	Jaminan Sosial				
	466.2	Pencarian dana untuk sumbangan: penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazar, dsb				
	466.3	Panti Asuhan				
49.	467	Bimbingan sosial	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINSOSPERMASDES SETDA : Bagian Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	467.1	Masyarakat suku terasing meliputi: bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT), dsb.nya				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
50.	468	PMI	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINAS KESEHATAN SETDA : Bagian Kesra PEMDES : Seksi Kesra
51.	469	Makam	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINSOSPERMASDES SETDA : Bagian Kesra PEMDES : Seksi Kesra
	469.1	Umum				
	469.2	Pahlawan				
	469.3	Khusus, keluarga, raja				
	469.4	Krematorium				
52.	470	<i>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</i>				
	470.1	Kebijakan dan program pemerintah untuk kependudukan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINDUKCAPIL PEMDES : Seksi Kesra
53.	471	Pendaftaran penduduk	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINDUKCAPIL PEMDES : Seksi Kesra
	471.1	Identitas penduduk	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINDUKCAPIL PEMDES : Seksi Pemerintahan
	471.11	Biodata				
	471.12	Kartu Identitas Anak				
	471.13	Kartu Tanda Penduduk				
	471.14	Kartu Keluarga				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	471.2	Perpindahan penduduk dalam wilayah Indonesia	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINDUKCAPIL PEMDES : Seksi Pemerintahan
	471.21	Perpindahan penduduk WNI				
	471.22	Perpindahan penduduk WNA dalam wilayah Indonesia				
	471.23	Perpindahan penduduk WNA tinggal sementara				
	471.3	Perpindahan penduduk antar negara	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINDUKCAPIL PEMDES : Seksi Pemerintahan
	471.31	Penduduk Indonesia ke Luar Negeri				
	471.32	Orang asing tinggal sementara				
	471.33	Orang asing tinggal tetap				
	471.34	Perpindahan penduduk antar negara di wilayah perbatasan antar negara (pelintas batas tradisional)				
	471.4	Pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINDUKCAPIL PEMDES : Seksi Pemerintahan
	471.41	Akibat bencana alam				
	471.42	Akibat kerusakan sosial				
	471.43	Pendaftaran penduduk daerah terbelakang				
	471.44	Pendaftaran penduduk rentan				
54.	472	Pencatatan sipil	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINDUKCAPIL PEMDES : Seksi Pemerintahan
	472.1	Kelahiran, kematian dan advokasi				
	472.11	Kelahiran				
	472.12	Kematian				
	472.13	Advokasi				
	472.2	Perkawinan, perceraian dan advokasi	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINDUKCAPIL PEMDES : Seksi Pemerintahan
	472.21	Perkawinan agama Islam				
	472.22	Perkawinan agama non Islam				
	472.23	Perceraian agama Islam				
	472.24	Perceraian agama non Islam				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	472.3	Pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINDUKCAPIL PEMDES : Seksi Pemerintahan
	472.31	Pengangkatan anak/Adopsi				
	472.32	Pengakuan anak				
	472.33	Pengesahan anak				
	472.34	Perubahan akta				
	472.35	Pembatalan akta				
	472.4	Pencatatan perubahan status perkawinan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINDUKCAPIL PEMDES : Seksi Pemerintahan
	472.5	Pencatatan kewarganegaraan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINDUKCAPIL PEMDES : Seksi Pemerintahan
	472.51	Akibat perkawinan				
	472.52	Akibat kelahiran				
	472.53	Naturalisasi				
	472.54	Perubahan WNA ke WNI				
55.	473	Informasi Kependudukan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINDUKCAPIL PEMDES : Seksi Kesra
	473.1	Teknologi Informasi Kependudukan				
	473.2	Pengolahan Data Kependudukan				
	473.3	Kerjasama pemanfaatan data dan inovasi				
56.	474	Perkembangan penduduk	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPPKBP3A, DINDUKCAPIL PEMDES : Seksi Kesra
	474.1	Pengarahannya kuantitas penduduk				
	474.2	Pengembangan kuantitas penduduk				
	474.3	Penataan persebaran penduduk				
	474.4	Perlindungan dan pemberdayaan penduduk				
	474.5	Pengembangan wawasan kependudukan				
57.	475	<i>TRANSMIGRASI</i>				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	475.1	Penyiapan informasi daerah transmigrasi	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP UKM PEMDES : Seksi Kesra
	475.11	Informasi potensi penempatan transmigrasi				
	475.12	Pemasyarakatan/ Sosialisasi transmigrasi				
	475.13	Peran serta pemerintah dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi				
	475.14	Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal				
	475.15	Kerjasama di urusan transmigrasi				
	475.16	Kepulauan transmigran				
	475.2	Pemukiman transmigrasi	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP UKM PEMDES : Seksi Kesra
	475.21	Penggunaan tanah pemukiman transmigrasi				
	475.22	Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi				
	475.23	Tata ruang satuan kawasan pengembangan, study kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi				
	475.24	Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi/peta informasi pemukiman				
	475.25	Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigran, fasilitas umum/sosial dan jaringan transportasi				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	475.26	Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP UKM PEMDES : Seksi Kesra
	475.27	Penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman transmigran				
	475.28	Tata ruang pemukiman transmigran				
	475.29	Pembinaan dan pengendalian sarana pemukiman transmigrasi				
	475.3	Pengerahan, pemindahan dan penempatan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP UKM PEMDES : Seksi Kesra
58.	476	Keluarga Berencana (meliputi kebijakan dan program KB)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPPKBP3A PEMDES : Seksi Kesra
	476.1	Pelayanan KB (termasuk pos KB, alat kontrasepsi, mobil unit keliling, dll)				
	476.2	Pembinaan dan penyuluhan KB termasuk penyuluhan lapangan KB (PLKB)				
	476.3	Pengembangan kader keluarga berencana dan penggerakan organisasi kemasyarakatan				
	476.4	Pembinaan dan penyuluhan KB melalui kelompok KB: Kader KB/ PPKBD dan institusi masyarakat				
59.	480	<i>MEDIA MASSA</i>				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	480.1	Kebijakan dan program pemerintah dalam bidang media massa	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKOMINFO SETDA : Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan PEMDES : Urusan TU & Umum
60.	481	Media cetak	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKOMINFO SETDA : Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan PEMDES : Urusan TU & Umum
	481.1	Surat Kabar				
	481.2	Majalah				
	481.3	Bulletin				
	481.4	Jurnal				
	481.5	Press Release, Klarifikasi berita				
	481.6	Layanan informasi				
481.7	Liputan Media Massa					
61.	482	Media elektronik	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKOMINFO SETDA : Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan PEMDES : Urusan TU & Umum
	482.1	Radio				
	481.2	Televisi				
	481.3	Film				
62.	483	Reklame / Periklanan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKOMINFO OPD : Sekretariat (Bag TU / Sub Bag Umum) SETDA : Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan PEMDES : Urusan TU & Umum
	483.1	Ketentuan pemasangan				
	483.2	Pameran				
63.	484	Kewartawanan/ jurnalistik	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKOMINFO SETDA : Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan PEMDES : Urusan TU dan Umum
	484.1	Pembentukan organisasi profesi				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	484.2	Kasus-kasus kewartawanan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKOMINFO SETDA : Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan PEMDES : Urusan TU Umum
	484.3	Penyalahgunaan profesi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKOMINFO SETDA : Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan PEMDES : Urusan TU Umum
	484.4	Bantuan kepada/ dari organisasi profesi wartawan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKOMINFO SETDA : Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan PEMDES : Urusan TU Umum
	484.5	Musyawarah Wartawan Indonesia	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKOMINFO SETDA : Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan PEMDES : Urusan TU Umum
	484.6	Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKOMINFO SETDA : Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan PEMDES : Kaur TU Umum
	484.7	Temu Pers/ Konferensi Pers	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKOMINFO SETDA : Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan PEMDES : Urusan TU dan Umum

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	484.8	Pers Tour	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKOMINFO SETDA : Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan PEMDES : Urusan TU dan Umum
	484.9	Kunjungan wartawan asing	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKOMINFO SETDA : Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan PEMDES : Urusan TU dan Umum
64.	485	Penyuluhan masyarakat	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKOMINFO SETDA : Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan PEMDES : Urusan TU dan Umum
	485.1	Publikasi				
	485.2	Pendirian Information Center				
65.	486	Pembinaan bidang informasi dan komunikasi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKOMINFO SETDA : Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan PEMDES : Urusan TU dan Umum
	486.1	Training Fotografi				
	486.2	Training Berita Jurnalistik				
	486.3	Bimbingan teknis informasi dan komunikasi				
	486.4	Rakorda Informasi dan Komunikasi				
	486.5	Rakor pengendalian kegiatan				
	486.6	Pengelolaan website pemerintah daerah				
66.	487	Hubungan antar lembaga	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKOMINFO SETDA : Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan PEMDES : Urusan TU dan Umum
	487.1	Non pemerintah				
	487.11	Wahana komunikasi masyarakat				
	487.12	Lembaga komunikasi masyarakat				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	487.2	Lembaga pemerintah	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKOMINFO SETDA : Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan PEMDES : Urusan TU dan Umum
	487.21	Pertemuan kehumasan (Bakohumas/Fokohumas)				
	487.22	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)				
	487.3	Luar negeri	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKOMINFO SETDA : Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan PEMDES : Urusan TU dan Umum
67.	488	Fasilitasi peningkatan pelayanan informasi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKOMINFO SETDA : Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan PEMDES : Urusan TU dan Umum
68.	489	Sistem naskah sosialisasi kegiatan gubernur / bupati	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKOMINFO SETDA : Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan PEMDES : Urusan TU dan Umum
	489.1	Himpunan naskah sambutan, himpunan naskah rubrik, himpunan dialog interaktif				
	489.2	Dialog Interaktif				
	489.3	Rubrik				
	489.4	Pembuatan kolom khusus hasil-hasil pembangunan				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
VI	500	PEREKONOMIAN				
1.	500.1	Dewan stabilisasi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
2.	501	Pengadaan pangan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
3.	502	Pengadaan sandang	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
4.	503	Perizinan pada umumnya (perizinan sesuai bidang, klasifikasikan pada masalahnya).	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPMPTSP SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Seksi Kesra
5.	504	Sensus Ekonomi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
6.	505	Inflasi Harga	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
7.	510	PERDAGANGAN				
	510.1	Promosi perdagangan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	510.11	Pekan raya				
	510.12	Iklan				
	510.13	Pameran				
	510.14	Event-event				
	510.15	Lomba-lomba (lomba desain, busana, kerajinan)				
	510.2	Pelelangan, distribusi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	510.21	Pemasaran sembako				
	510.22	Pemasaran hasil industri				
	510.23	Penentuan harga pokok				
	510.3	Bina Usaha dan Sarana Perdagangan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	510.31	Rencana dan program kerja				
	510.32	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi				
	510.33	Pelaksanaan Teknis				
	510.34	Pemantauan				
	510.35	Evaluasi dan Pelaporan				
	510.4	Perizinan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPMPTSP SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Seksi Kesra
	510.41	Penerbitan SIUP				
	510.42	Perpanjangan				
	510.43	Izin Prinsip				
	510.44	Rekomendasi				
	510.5	Perdagangan antar pulau	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
510.51	Kerjasama bahan baku					
510.52	Industri Pemasaran					
510.53	Kontrak					

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	510.6	Tera	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	510.61	Tera Ulang Ukuran	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	510.62	Takaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	510.63	Timbangan				
	510.64	Kalibrasi				
	510.65	Cap tanda Tera				
	510.66	Biaya Tera	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	510.7	Bantuan Peralatan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	510.71	Proposal				
	510.72	Surat Perjanjian/kontrak	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	510.73	Serah Terima				
	510.8	Perizinan / Rekomendasi Tanda Pabrik	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	510.9	Kemetrologian	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	510.91	Standart tingkat tiga	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	510.92	Standart Kerja Satuan Ukuran				
	510.93	Ukuran Metrologi				
	510.931	Peralatan				
	510.932	Laboratorium Metrologi				
	510.933	Tanki Ukur Mobil				
	510.934	Meter Taxi				
	510.935	KWH Meter				
	510.936	S P B U				
8.	511	Pemasaran	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	511.1	Sembilan bahan pokok : beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, gula dan sebagainya	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 6.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	511.2	P a s a r	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	511.3	Pertokoan, kaki lima, kios				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	511.4	Pusat perbelanjaan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
9.	512	Ekspor	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	512.1	Ekspor Hasil Industri	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	512.2	Izin Ekspor				
	512.3	Pengembangan Pasar Luar Negeri				
	512.4	Managemen Perdagangan Internasional				
	512.5	Ekspor Hasil Industri	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	512.51	Kebijakan				
	512.52	Pemasaran				
	512.6	Pemberitahuan Ekspor Barang	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	512.7	Pengawasan Mutu Barang				
	512.8	Eksportir Terdaftar				
	512.9	Evaluasi dan Pelaporan				
10.	513	Impor	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	DPMPSTP SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	513.1	Izin Impor	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPMPTSP SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Seksi Kesra
	513.11	Pemberian Izin				
	513.12	Pengendalian Izin				
	513.2	Standar Mata Dagang Impor	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Seksi Kesra
	513.3	Managemen Perdagangan Internasional	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Seksi Kesra
	513.4	Kegiatan Impor	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Seksi Kesra
	513.41	Pembinaan Impor				
	513.42	Pengendalian Impor				
	513.43	Pemantauan Impor				
	513.5	Faktor-faktor Pendukung	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Seksi Kesra
	513.6	Pengawasan Mutu Barang Impor	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Seksi Kesra
	513.7	Penyaluran Kegiatan Impor	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Seksi Kesra
	513.71	Bahan Konsumsi				
	513.72	Bahan Baku				
	513.73	Bahan Penolong				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	513.8	Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Impor	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Seksi Kesra
11.	514	Perdagangan antar pulau	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	514.1	Kerjasama Bahan Baku	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	514.2	Industri Pemasaran	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	514.3	Kontrak	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Seksi Kesra
12.	515	Perdagangan Luar Negeri	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	515.1	Pengembangan Potensi Perdagangan Luar Negeri				
	515.11	Promosi dan Informasi				
	515.12	Pameran				
	515.13	Kerjasama				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
13.	516	Pergudangan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	516.1	Peti Kemas				
	516.2	Tangki Penyimpanan				
14.	517	Aneka Usaha perdagangan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
15.	518	<i>KOPERASI DAN UMKM</i>				
	518.1	Bina Usaha Koperasi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP UKM SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	518.11	Permodalan Koperasi				
	518.12	Distribusi dan Jasa Koperasi				
	518.2	Bina Lembaga Koperasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Seksi Kesra
	518.21	Organisasi Koperasi				
	518.211	Anggaran Dasar, Anggaran Tumah Tangga, Akte Pendirian				
	518.212	Penyelesaian perselisihan / persengketaan				
	518.213	Keragaman Koperasi				
	518.22	Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi				
	518.221	Rapat Anggota Tahunan				
	518.222	Pengurus dan Badan Pemeriksa				
	518.223	Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi				
518.23	Bina Tata Laksana Koperasi					
518.24	Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi					
518.25	Pengawasan Koperasi					

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	518.26	Penyuluhan Koperasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Seksi Kesra
	518.3	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Seksi Kesra
	518.31	Pembinaan UMKM				
	518.32	Pengawasan UMKM				
16.	520	<i>PERTANIAN (meliputi : kebijakan dan program bidang pertanian)</i>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERTAN KP SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Seksi Kesra
17.	521	Tanaman pangan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERTAN KP SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Seksi Kesra
	521.1	Rencana dan Program	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERTAN KP SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Seksi Kesra
	521.2	Produksi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERTAN KP SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	521.21	Padi				
	521.22	Palawija				
	521.23	Hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias)				
	521.3	Sarana Usaha Pertanian	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERTAN KP SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	521.31	Peralatan				
	521.32	Pembenihan, pembibitan				
	521.33	Pupuk				
	521.34	Irigasi				
	521.35	Rehabilitasi lahan pertanian (termasuk lahan kritis)				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	521.4	Perlindungan tanaman (termasuk pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERTAN KP SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	521.5	Pengusaha, petani	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERTAN KP SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	521.6	Pemasaran dan promosi pertanian	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERTAN KP SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
	521.7	Pengembangan SDM pertanian	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERTAN KP SETDA : Bagian Perekonomian dan SDA PEMDES : Seksi Kesra
18.	522	Kehutanan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Provinsi</i>
	522.1	Perencanaan Hutan				
	522.2	Tata Guna Hutan				
	522.3	Pengusahaan Hutan				
	522.4	Sarana Usaha				
	522.5	Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam				
	522.6	Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan				
	522.7	Hutan Produksi				
	522.8	Kawasan Lindung				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
19.	523	<i>PERIKANAN DAN KELAUTAN</i>				
	523.1	Rencana dan Program	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKANNAK PEMDES : Seksi Kesra
	523.11	Penyuluhan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKANNAK PEMDES : Seksi Kesra
	523.12	Teknologi				
	523.2	Produksi Perikanan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKANNAK PEMDES : Seksi Kesra
	523.21	Pelelangan				
	523.22	Standarisasi Mutu Hasil Perikanan				
	523.23	Perikanan budidaya				
	523.24	Sertifikasi kesehatan ikan				
	523.3	Usaha Perikanan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKANNAK PEMDES : Seksi Kesra
	523.31	Pembibitan				
	523.32	Daerah Penangkapan				
	523.33	Perizinan Pembudidayaan Ikan				
	523.4	Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKANNAK PEMDES : Seksi Kesra
	523.41	Eksport Komoditas Perikanan				
	523.42	Impor Komoditas Perikanan				
	523.5	Sarana Prasarana Perikanan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKANNAK PEMDES : Seksi Kesra
	523.51	Peralatan : Kapal / perahu, jaring, dll.				
	523.52	TPI / PPI				
	523.53	Pelabuhan				
523.54	Kesyahbandaran					

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH																																																																	
	523.6	Pengendalian Hama dan Penyakit	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKANNAK PEMDES : Seksi Kesra																																																																	
	523.61	Penyakit ikan						523.62	Hama ikan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKANNAK PEMDES : Seksi Kesra		523.63	Obat-obatan		523.64	Kesehatan Lingkungan		523.65	Konservasi Perairan Darat		523.7	Pengusaha, Nelayan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKANNAK PEMDES : Seksi Kesra		523.8	Konservasi dan Suaka Laut	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKANNAK PEMDES : Seksi Kesra	20.	524	<i>PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</i>						524.1	Produksi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKANNAK PEMDES : Seksi Kesra		524.11	Perbibitan		524.12	Penyebaran dan pengembangan peternakan		524.13	Budidaya		524.2	Usaha peternakan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKANNAK PEMDES : Seksi Kesra		524.21	Pelayanan usaha		524.22
	523.62	Hama ikan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKANNAK PEMDES : Seksi Kesra																																																																	
	523.63	Obat-obatan																																																																					
	523.64	Kesehatan Lingkungan																																																																					
	523.65	Konservasi Perairan Darat																																																																					
	523.7	Pengusaha, Nelayan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKANNAK PEMDES : Seksi Kesra																																																																	
	523.8	Konservasi dan Suaka Laut	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKANNAK PEMDES : Seksi Kesra																																																																	
20.	524	<i>PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</i>																																																																					
	524.1	Produksi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKANNAK PEMDES : Seksi Kesra																																																																	
	524.11	Perbibitan																																																																					
	524.12	Penyebaran dan pengembangan peternakan																																																																					
	524.13	Budidaya																																																																					
	524.2	Usaha peternakan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKANNAK PEMDES : Seksi Kesra																																																																	
	524.21	Pelayanan usaha																																																																					
	524.22	Pengolahan hasil dan pemasaran																																																																					
	524.23	Pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan																																																																					

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	524.3	Kesehatan hewan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKANNAK, DINKES PEMDES : Seksi Kesra
	524.31	Pengamatan dan penyidikan penyakit hewan				
	524.32	Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan				
	524.33	Obat-obat hewan				
	524.34	Pelayanan kesehatan hewan				
	524.4	Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKANNAK, DINKES PEMDES : Seksi Kesra
	524.41	Zoonosis dan kesejahteraan hewan				
	524.42	Hygieni dan sanitasi				
	524.43	Produk hewani				
	524.5	Laboratorium kesehatan hewan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKANNAK, DINKES PEMDES : Seksi Kesra
	524.51	Pengujian mutu asal hewan				
	524.52	Pengujian mutu produk bahan asal hewan				
	524.53	Pengujian sampel penyakit				
	524.6	Inseminasi buatan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKANNAK PEMDES : Seksi Kesra
	524.61	Produksi distribusi dan pemasaran				
	524.62	Pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi				
	524.7	Pembibitan dan budi daya ternak	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKANNAK PEMDES : Seksi Kesra
21.	525	<i>PERKEBUNAN</i>				
	525.1	Program dan pelaporan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERTAN KP PEMDES : Seksi Kesra
	525.11	Pelaporan				
	525.12	Monitoring				
	525.13	Statistik perkebunan				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	525.2	Produksi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERTAN KP PEMDES : Seksi Kesra
	525.21	Karet				
	525.22	T e h				
	525.23	Tembakau				
	525.24	T e b u				
	525.25	Cengkeh				
	525.26	Kelapa, kopra, kelapa sawit				
	525.27	Kopi				
	525.28	Kakao				
	525.29	Jenis tanaman yang lain				
	525.3	Usaha Perkebunan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERTAN KP PEMDES : Seksi Kesra
	525.31	Benih				
	525.32	Pembibitan				
	525.33	Kelompok tani				
	525.34	Kemitraan				
	525.35	Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan				
	525.36	Pemasaran hasil perkebunan				
	525.4	Perlindungan tanaman	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERTAN KP PEMDES : Seksi Kesra
	525.41	H a m a				
	525.42	Pestisida				
	525.43	Agensia pengendalian hayati				
	525.5	Alat dan mesin perkebunan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERTAN KP PEMDES : Seksi Kesra
	525.6	Pengolahan lahan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERTAN KP PEMDES : Seksi Kesra
	525.61	Terasering				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	525.7	Pemasyarakatan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERTAN KP PEMDES : Seksi Kesra
	525.71	Penyuluhan				
	525.72	Sosialisasi				
	525.73	Informasi				
22.	526	Ketahanan Pangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERTAN KP PEMDES : Seksi Kesra
	526.1	Program Bimbingan Massal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERTAN KP PEMDES : Seksi Kesra
	526.2	Pengembangan Sarana Sumber Daya	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERTAN KP PEMDES : Seksi Kesra
	526.21	Pembinaan Teknologi				
	526.22	Sarana Produksi dan Permodalan				
	526.23	Kelembagaan				
	526.3	Agribisnis	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERTAN KP PEMDES : Seksi Kesra
	526.31	Mutu Hasil				
	526.32	Pengelolaan Hasil Pangan				
	526.33	Pemasaran Hasil				
	526.34	Kemitraan				
	526.4	Distribusi Pangan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERTAN KP PEMDES : Seksi Kesra
	526.41	Sistem dan Pola Distribusi				
	526.42	Sarana dan Prasarana Distribusi				
	526.43	Pengadaan dan cadangan Pangan				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	526.5	Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERTAN KP PEMDES : Seksi Kesra
	526.51	Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan				
	526.52	Pola Konsumsi Pangan Masyarakat				
	526.53	Sistem Informasi Pangan				
23	527	<i>PENYULUHAN</i>				
	527.1	Sumber daya manusia	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERTAN KP PEMDES : Seksi Kesra
	527.2	Kelembagaan				
	527.3	Penyelenggaraan penyuluhan				
24.	530	<i>PERINDUSTRIAN</i>				
	530.1	Undang-Undang Gangguan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG DINAS LH PEMDES : Seksi Kesra
25.	531	Industri Logam	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG PEMDES : Seksi Kesra
26.	532	Industri Mesin / Elektronik	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
27.	533	Industri Kimia / Farmasi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG PEMDES : Seksi Kesra
28.	534	Industri Tekstil	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG PEMDES : Seksi Kesra
29.	535	Industri Makanan / Minuman	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG PEMDES : Seksi Kesra
30.	536	Aneka Industri / Perusahaan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG PEMDES : Seksi Kesra
	536.1	Home Industri				
31.	537	Aneka Kerajinan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG PEMDES : Seksi Kesra
	537.1	Kerajinan rakyat				
32.	538	Perusahaan Daerah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPERINDAG PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
33.	540	<i>PERTAMBANGAN / KESAMUDRAAN</i>				
34.	541	Minyak dan gas bumi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Provinsi / Pusat</i>
	541.1	Pengusahaan				
	541.2	Penyaluran				
	541.3	Tangki, Pompa, Tangker				
35.	542	Gas Bumi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Provinsi / Pusat</i>
36.	543	Logam Mulia seperti : Intan, emas, perak	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Provinsi / Pusat</i>
37.	544	L o g a m	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Provinsi / Pusat</i>
38.	545	Aneka Tambang / bahan galian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Provinsi / Pusat</i>
	545.1	Air Permukaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Provinsi / Pusat</i>
	545.2	Air Bawah Tanah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Provinsi / Pusat</i>
	545.21	Perizinan				
	545.22	Sumur pantau				
	545.23	Pemasangan / Penyelengan Water Meter				
	545.24	Produksi / Nilai Perolehan Air (NPA)				
545.25	Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan					

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
39.	546	Geologi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Provinsi / Pusat</i>
	546.1	Pemetaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Provinsi / Pusat</i>
	546.2	Mitigasi bencana geologi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Provinsi / Pusat</i>
	546.3	Vulkanologi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Provinsi / Pusat</i>
	546.4	Sumber Daya Mineral	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Provinsi / Pusat</i>
	546.5	Hidrogeologi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Provinsi / Pusat</i>
	546.6	Gerakan Tanah (Longsoran, Amblesan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Provinsi / Pusat</i>
	546.7	Pengawasan, Pengendalian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Provinsi / Pusat</i>
40.	547	Hidrologi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Provinsi / Pusat</i>

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
41.	548	Kesamudraan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Urusan Pemerintah Provinsi /Pusat
43.	550	PERHUBUNGAN				
44.	551	Perhubungan Darat	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan
	551.1	Lalu lintas jalan raya, sungai, danau	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan
	551.11	Keamanan lalu lintas, rambu-rambu				
	551.12	Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur)				
	551.13	Kecelakaan Lalu Lintas				
	551.2	Angkutan jalan raya	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan
	551.21	Perizinan				
	551.22	Terminal				
	551.23	Alat Angkutan				
	551.24	Jembatan Timbang / Lebih Muatan				
	551.25	Uji Mutu				
	551.3	Angkutan sungai	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan
	551.4	Angkutan danau	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	551.5	F e r i	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan
	551.6	Perkereta – apian	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan
	551.61	Sarana meliputi : Lokomotif, Gerbong, Bogie				
	551.62	Prasarana (Jalan/Jembatan)				
	551.63	Trayek				
	551.64	Angkutan Penumpang				
	551.66	Keselamatan				
	551.67	Kecelakaan				
	551.68	Perawatan / Perbaikan				
	551.69	Perizinan				
	551.70	Jadwal Perjalanan				
45.	552	Perhubungan Laut	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan
	552.1	Lalu lintas angkutan laut	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan
	552.2	Perkapalan – alat angkutan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	552.3	Pelabuhan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan
	552.4	Pengerukan / Perawatan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan
	552.5	Penjagaan Pantai	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan
	552.6	Angkutan Barang	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan
	552.7	Keselamatan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan
	552.8	Kecelakaan Gangguan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	552.9	Perizinan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan
46.	553	Perhubungan Udara	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan
	553.1	Lalu lintas angkutan udara	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan
	553.2	Pelabuhan Udara	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan
	553.3	Alat angkutan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan
	553.4	Angkutan Barang	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	553.5	Sertifikasi Kelaikan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan
	553.6	Keselamatan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan
	553.7	Kecelakaan / Gangguan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan
	553.8	Umum	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan
	553.9	Perizinan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINHUB PEMDES : Seksi Pemerintahan
47.	554	<i>P O S</i>	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	554.1	Pembinaan				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	554.2	Pelayanan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	554.21	Jasa Pos				
	554.22	Jasa Titipan				
	554.23	Jasa Giro				
	554.24	Benda Pos /Perangko				
	554.25	Sampul Peringatan				
	554.26	Jasa Pos Elektronik				
	554.3	Perizinan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang menggangu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	554.31	Rekomendasi Usaha Jasa Pos / Titipan				
	554.32	Pembukaan Agen / Cabang				
	554.4	Gangguan sarana dan prasarana	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
48.	555	<i>TELEKOMUNIKASI</i>				
	555.1	Kebijakan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang menggangu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKOMINFO PEMDES : Seksi Pemerintahan
	555.2	Peralatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang menggangu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKOMINFO PEMDES : Seksi Pemerintahan
	555.21	Telepon				
	555.22	Telegram, Telex / SBB, Faximile				
	555.23	Satelit, Internet				
	555.24	Stasiun Bumi, Parabola				
	555.25	Radio Komunikasi				
	555.3	Sistem	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang menggangu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKOMINFO PEMDES : Seksi Pemerintahan
	555.4	Pembinaan, penertiban	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan,	Memiliki dampak yang menggangu	DINKOMINFO PEMDES : Seksi Pemerintahan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				pengawas serta penegak hukum	kinerja Pemda dan Pemdes	
	555.5	Perizinan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINKOMINFO PEMDES : Seksi Pemerintahan
49.	556	<i>PARIWISATA DAN REKREASI</i>				
	556.1	Usaha Pariwisata	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPORABUDPAR PEMDES : Seksi Kesra
	556.11	Usaha Jasa Pariwisata : Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPORABUDPAR PEMDES : Seksi Kesra
	556.12	Izin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPORABUDPAR PEMDES : Seksi Kesra
	556.13	Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPORABUDPAR PEMDES : Seksi Kesra
	556.14	Usaha Sarana Pariwisata	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	DINPORABUDPAR PEMDES : Seksi Kesra
	556.141	Izin Pariwisata				
	556.142	Izin Usaha Pariwisata				
	556.143	Izin Usaha Jasa Pariwisata				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	556.144	Izin Pengusaha Obyek dan Daya Tarik wisata		4. Publik 5. Penegak Hukum	kinerja Pemda dan Pemdes	
	556.145	Izin Usaha Sarana				
	556.15	Wisatawan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPORABUDPAR PEMDES : Seksi Kesra
	556.151	Wisatawan Nusantara				
	556.152	Wisatawan Mancanegara				
	556.16	Promosi dan Informasi Priwisata	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPORABUDPAR PEMDES : Seksi Kesra
	556.161	Dalam Negeri				
	556.162	Luar Negeri				
	556.2	Perhotelan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPORABUDPAR PEMDES : Seksi Kesra
	556.21	Status Hotel				
	556.22	Kelas Hotel				
	556.23	Tarif				
	556.3	Travel service	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPORABUDPAR PEMDES : Seksi Kesra
	556.31	Pramu Wisata				
	556.32	Biro Perjalanan/Angkutan Wisata				
	556.33	Souvenir				
	556.34	Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina)				
	556.4	Tempat Rekreasi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPORABUDPAR PEMDES : Seksi Kesra
	556.41	Obyek dan Daya Tarik Wisata				
	556.411	Ciptaan Tuhan				
	556.412	Hasil Karya Manusia				
	556.42	Rehabilitasi/Perawatan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	DINPORABUDPAR PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	kinerja Pemda dan Pemdes	
	556.43	Pengembangan Fasilitas	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPORABUDPAR PEMDES : Seksi Kesra
	556.44	Tanah/Bangunan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPORABUDPAR PEMDES : Seksi Kesra
	556.45	Bina Usaha	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPORABUDPAR PEMDES : Seksi Kesra
	556.46	Institusi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINPORABUDPAR PEMDES : Seksi Kesra
	556.461	Asosiasi				
	556.462	Lembaga Kepariwisataa				
	556.5	Hiburan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	DINPORABUDPAR PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	kinerja Pemda dan Pemdes	
50.	557	<i>METEOROLOGI</i>				
	557.1	Curah hujan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	557.2	Hujan buatan				
	557.3	Ramalan cuaca				
	557.4	Peneropongan bintang				
51.	560	<i>TENAGA KERJA</i>				
	560.1	Data Permintaan TKI/TKW Dari Luar Negeri	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	560.11	Data Persediaan TKI/TKW Dari Daerah				
	560.2	Job Order TKI Ke Luar Negeri	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	560.3	Rekrutmen Calon TKI/TKW	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	560.4	Seleksi Naker Ke Luar Negeri				DINNAKERKOP & UKM

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	560.41	Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI/TKW	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	PEMDES : Seksi Pelayanan
	560.42	Berkas Persyaratan Calon TKI/TKW				
	560.43	Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI/TKW				
	560.5	Persyaratan Naker TKI/TKW Ke Luar Negeri	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	560.51	Permohonan Rekomendasi Pasport				
	560.52	Perjanjian Kerja TKI/TKW				
	560.53	Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)				
	560.54	Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri				
	560.55	Pelatihan TKI/TKW				
	560.6	Pemberangkatan Naker	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	560.61	Pemberangkatan Ke Luar Negeri				
	560.62	Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW Ke Luar Negeri				
	560.63	Berita Acara Serah Terima TKI/TKW				
	560.7	Pemulangan Naker	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	560.71	Kepulangan TKI/TKW Karena Kontraknya habis				
	560.72	Pemulangan TKI/TKW Ilegal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	560.73	TKI/TKW Terkena Kasus Pidana	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
52.	561	U p a h	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	561.1	Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah/Nasional	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	561.2	Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabulapen/Kota dan Provinsi	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	561.3	Kebutuhan Fisik Minimum	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	561.4	Perhitungan Upah Kerja (Termasuk upah lembur)	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	561.5	Laporan Data Remittance	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	561.6	Pembayaran Gaji/Upah TKI/TKW	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
53.	562	Penempatan Tenaga Kerja	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	562.1	Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	562.11	Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP)				
	562.12	Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional (termasuk didalamnya penempatan pekerja anak)				
	562.13	Pengembangan Kesempatan Berusaha / Perluasan Kerja (termasuk didalamnya penempatan pekerja cacat)				
	562.2	Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	562.3	Lembaga Penyalur Naker	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	562.31	Izin Pendirian Lembaga Penyalur Naker Antar Kerja Lokal /Daerah dan Antar Kerja Negara (AKAN)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	562.32	Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKS/ BKK)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	562.33	Pencabutan Izin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
54.	563	Latihan Kerja	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	563.1	Pendidikan Pekerja	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	563.11	Pendidikan Latihan Kerja				
	563.12	Diklat Di Dalam Negeri (PKL, Prakerin, OJT)				
	563.13	Diklat Di Luar Negeri (Pemagangan, OJT)				
	563.2	Sarana dan Prasarana Latihan Kerja	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	563.21	Tempat Pelatihan Kerja (BLK)				
	563.22	Instruktur / Pelatih				
	563.23	Modul/Silabus dan Bahan Praktek				
	563.24	Kurikulum dan Metode Pengajaran				
	563.25	Sertifikat				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	563.3	Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
55.	564	Tenaga Sukarela	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	564.1	Butsi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	564.2	Padat Karya				
56.	565	Perselisihan Pekerja	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	565.1	Perselisihan dan Perkara Hukum Naker	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	565.11	Pengaduan Perkara Pekerja / Naker (termasuk didalamnya pendaftaran / pencabutan perkara)				
	565.12	Pemeriksaan Perkara Perburuhan / Naker				
	565.13	Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Perburuhan / Naker				
	565.14	Sidang Perkara Perselisihan Perburuhan / Naker (termasuk didalamnya jadwal, tempat pelaksanaan sidang dan pemanggilan yang berperkara)				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	565.15	Hasil Pemutusan Sidang Perkara Perselisihan Perburuan (Naker)				
	565.16	Peninjauan kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (P4D / P4P)				
	565.17	Permintaan Eksekusi Terhadap Hasil Keputusan KP2K (P4D / P4P)				
	565.18	Daftar Usulan, Susunan dan Penetapan Anggota KP2K (P4D / P4P)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	565.2	Pemogokan / Unjuk Rasa Tenaga Kerja	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
57.	566	Keselamatan Kerja	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	566.1	Instalasi Proteksi Kebakaran	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	566.2	Pemakaian Alat Keselamatan Kerja	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	566.3	Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam bekerja	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	566.4	Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	566.5	Pelatihan / Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	566.6	Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	566.7	Gangguan Lingkungan Tempat Usaha	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	566.8	Perlengkapan Sarana Kerja	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	566.81	Pemasangan dan Pemakaian Lift (Pesawat angkat/angkut)				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	566.82	Pemasangan dan Pemakaian Pesawat Uap (Ketel Uap)		3. Pengawas internal / eksternal	kinerja Pemda dan Pemdes	
	566.83	Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel		4. Publik		
	566.84	Pemasangan dan Pemakaian Tanki Tak Bertekanan		5. Penegak Hukum		
	566.85	Pemasangan dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran				
	566.9	Izin Tenaga Kerja Wanita Masuk Malam Hari (shift malam)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
58.	567	Pemutusan Hubungan Kerja	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	567.1	Pengaduan PHK Sepihak	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	567.2	PHK Masal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	567.3	Bantuan Hukum Bagi Pekerja Yang di PHK	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	567.4	Izin Melakukan PHK	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	567.5	Perhitungan Masa Kerja Bagi Pekerja yang di PHK	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan,	Memiliki dampak yang mengganggu	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				pengawas serta penegak hukum	kinerja Pemda dan Pemdes	
	567.6	Pemberian Uang Tunggu Bagi Pekerja yang di PHK	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	567.7	Pemberian Uang Pesangon Bagi Pekerja yang di PHK	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
59.	568	Kesejahteraan Pekerja	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	568.1	Bantuan Kredit / Bantuan Modal Kerja Bagi Naker	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	568.11	Pemilihan Pekerja Teladan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	568.2	Perumahan Pekerja	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				4. Publik 5. Penegak Hukum	kinerja Pemda dan Pemdes	
	568.3	Keikutsertaan Pekerja dalam Program Jamsostek	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	568.4	Koperasi Pekerja	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	568.5	Sarana Transportasi Pekerja	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	568.6	Perpustakaan Pekerja	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	568.7	Tempat Ibadah Pekerja	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	568.8	Rekreasi dan Olah Raga Pekerja	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				4. Publik 5. Penegak Hukum	kinerja Pemda dan Pemdes	
	568.9	Pendirian, pendaftaran dan kegiatan Organisasi Pekerja	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	568.91	Lembaga Kerjasama Bipartid				
60.	569	Tenaga Kerja Orang Asing	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	569.1	Rekomendasi Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	569.2	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	569.3	Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	569.4	Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	569.5	Data Tenaga Kerja Asing	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	569.6	Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing, Perselisihan Kerja dan Pengaduan Tenaga Kerja Asing	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	569.7	Pemulangan Tenaga Kerja Asing	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	569.8	Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
	569.9	Tenaga Kerja Asing Ilegal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DINNAKERKOP & UKM PEMDES : Seksi Pelayanan
61.	570	<i>PENANAMAN MODAL</i>				
62.	571	Modal Domestik	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPMPPTSP PEMDES : Seksi Kesra
	571.1	Kerjasama Penanaman Modal Antar Provinsi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPMPPTSP PEMDES : Seksi Kesra
	571.2	Kerjasama Penanaman Modal Antar Kabupaten	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPMPPTSP PEMDES : Seksi Kesra
63.	572	Modal Asing	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan,	Memiliki dampak yang mengganggu	DPMPPTSP PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				pengawas serta penegak hukum	kinerja Pemda dan Pemdes	
64.	573	Modal, Patungan (Joint Venture) / Penyertaan Modal	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPMPTSP PEMDES : Seksi Kesra
65.	574	Pasar uang dan modal	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPMPTSP PEMDES : Seksi Kesra
66.	575	S a h a m	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPMPTSP PEMDES : Seksi Kesra
67.	576	Perizinan (izin usaha, izin prinsip)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPMPTSP PEMDES : Seksi Kesra
68.	580	<i>PERBANKAN MONETER</i>				
69.	581	K r e d i t	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Urusan Keuangan
70.	582	Investasi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	DPMPTSP PEMDES : Urusan Keuangan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				4. Publik 5. Penegak Hukum	kinerja Pemda dan Pemdes	
71.	583 583.1	Tabungan Deposito	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Urusan Keuangan
72.	584	Bank Pembangunan Daerah, termasuk BPD, BPR, BKK, Bank Pasar.	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Urusan Keuangan
73.	585	Asuransi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Urusan Keuangan
	585.1	Dana Kecelakaan lalu lintas (Jasa Raharja)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Urusan Keuangan
	585.2	Polis	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Urusan Keuangan
	585.3	Premi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Urusan Keuangan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	585.4	Tertanggung/pemegang polis	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Urusan Keuangan
	585.5	Uang Pertanggungan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Urusan Keuangan
	585.6	Jiwa	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Urusan Keuangan
	585.7	Kebakaran	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Urusan Keuangan
	585.8	Pendidikan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Urusan Keuangan
74.	586	Alat Pembayaran meliputi : Cek, giro, wesel, transfer	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	SETDA : Bagian Perekonomian PEMDES : Urusan Keuangan
75.	587	Fiscal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
76.	588	Hutang Negara	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
77.	589	Moneter	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
78.	590	AGRARIA				
	590.1	Harga Dasar Tanah	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
79.	591	Tata Guna Tanah	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	591.1	Pemetaan dan Pengukuran	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	591.2	Perpetaan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	591.3	Penyediaan data, peta dan publikasi	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	591.4	Fakta tata guna tanah	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	591.5	Tanah Kritis	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
80.	592	Landreform	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	592.1	Redistribusi	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	592.11	Pendaftaran pemilikan tanah dan pengurusan tanah pertanian	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				4. Publik 5. Penegak Hukum	kinerja Pemda dan Pemdes	
	592.12	Penentuan tanah objek landreform	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	592.13	Pembagian tanah objek landreform	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	592.14	Sengketa redistribusi tanah objek landreform	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	592.2	Ganti rugi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	592.21	Ganti rugi tanah kelebihan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	592.22	Sengketa ganti rugi tanah kelebihan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	592.23	Ganti rugi tanah absentee	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	592.24	Sengketa ganti rugi tanah absentee	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	592.25	Ganti rugi tanah partikelir	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	592.26	Sengketa ganti rugi tanah partikelir	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	592.3	Bagi hasil	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	592.31	Penetapan imbangan bagi hasil				
	592.32	Pelaksanaan perjanjian bagi hasil				
	592.33	Sengketa perjanjian bagi hasil				
	592.4	Gadai Tanah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	592.41	Pendaftaran pelaksanaan gadai tanah				
	592.42	Pelaksanaan gadai tanah				
	592.43	Sengketa gadai tanah				
	592.5	Bimbingan dan Penyuluhan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	592.6	Pengembangan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				4. Publik 5. Penegak Hukum		
	592.7	Yayasan Dana Landreform	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
81.	593	Pengurusan hak – hak tanah				
	593.1	Penyusunan program dan bimbingan teknis	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	593.11	Sewa tanah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	593.12	Sewa tanah untuk tanaman tertentu : tebu, tembakau, rosela, corchorus	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	593.2	Hak milik	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	593.21	Perorangan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	593.22	Badan Hukum	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan,	Memiliki dampak yang mengganggu	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				pengawas serta penegak hukum	kinerja Pemda dan Pemdes	
	593.3	Hak pakai	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	593.31	Perorangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	593.311	Warga Negara Indonesia				
	593.312	Warga Negara Asing				
	593.32	Badan Hukum	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	593.321	Badan Hukum Indonesia				
	593.322	Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang asing				
	593.33	Tanah gedung-gedung negeri				
	593.4	Guna usaha	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	593.41	Perkebunan besar				
	593.42	Perkebunan rakyat				
	593.43	Peternakan				
	593.44	Perikanan				
	593.45	Kehutanan				
	593.5	Hak guna bangunan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	593.51	Perorangan				
	593.52	Badan hukum				
	593.53	P3MB (Panitia Pelaksanaan Pengusaha Milik Belanda)				
	593.54	Badan hukum asing Belanda - PBK No. 5/56				
	593.55	Pemulihan hak (Pen Pres 4 / 1960)				
	593.6	Hak Pengelolaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan,	Memiliki dampak yang mengganggu	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	593.61	PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate		pengawas serta penegak hukum	kinerja Pemda dan Pemdes	
	593.62	Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan				
	593.7	Sengketa tanah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	593.71	Peradilan perkara tanah				
	593.8	Pencabutan dan pembebasan tanah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	593.81	Pencabutan hak				
	593.82	Pembebasan Tanah				
	593.83	Ganti rugi tanah				
82.	594	Pendaftaran tanah	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	594.1	Pengukuran / pemetaan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	594.11	Fotogrametri				
	594.12	Terristis				
	594.13	Triangulasi				
	594.14	Peralatan				
	594.2	Dana pengukuran	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	594.3	Sertifikat	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				5. Penegak Hukum		
	594.4	Penjabat Pembuat Akte Tanah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
83.	595	Transmigrasi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	595.1	Tata guna tanah				
	595.2	Landreform				
	595.3	Pengurusan Hak - Hak Tanah				
	595.4	Pendaftaran Tanah				

NO.	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
VII	600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN				
1.	601	Tata bangunan konstruksi, industri konstruksi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan
2.	602	Prakualifikasi				
	602.1	Daftar Rekanan Mampu (DRM)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan
	602.2	Tanda Daftar Rekanan (TDR)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan
	602.3	Kontraktor, pemborong	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan
	602.4	Tender	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan
	602.5	Penunjukan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan
	602.51	Penunjukan Langsung				
3.	603	Arsitektur	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan

NO.	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
4.	604	Bahan bangunan				
	604.1	Tanah dan batu seperti : batu belah, steen slaag, split dsb Pasir, koral, lempung, kapur, marmer.	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan
	604.2	Aspal, meliputi aspal buatan, aspal alam (Butas)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan
	604.3	Besi dan logam lainnya	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Huku	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan
	604.31	Besi beton				
	604.32	Besi Profil (Konstruksi)				
	604.33	Paku				
	604.34	Aluminium Profil				
604.4	Bahan-bahan pelindung dan pengawet (Cat, Tech oil, Pengawet kayu)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan	
604.5	Semen	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan	

NO.	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	604.6	Kayu, seperti : balok, papan, dolken, plywood, gabus dsb.	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan
	604.7	Bahan penutup atap (genting, asbes gelombang, seng dan sebagainya)	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan
	604.8	Alat penggantung dan pengunci	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan
	604.9	Bahan-bahan bangunan lainnya	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan
5.	605	Instalasi				
	605. 1	Instalasi bangunan	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan

NO.	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	605.2	Instalasi listrik	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan
	605.3	Instalasi air / sanitasi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan
6.	606	Konstruksi Pencegahan				
	606.1	Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan
	606.2	Konstruksi pencegahan terhadap gempa	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan
	606.3	Konstruksi pencegahan terhadap angin/udara/panas	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan

NO.	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	606.4	Konstruksi pencegahan terhadap kegaduhan	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan
	606.5	Konstruksi pencegahan terhadap gas/eksplosive	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan
	606.6	Konstruksi pencegahan terhadap serangga	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan
	606.7	Konstruksi pencegahan terhadap radiasi atom	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan
7.	607	Macam Konstruksi	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Pemerintahan

NO.	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
8.	610	PENGAIRAN				
9.	611	Irigasi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	611.1	Bangunan waduk	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	611.11	Bendungan				
	611.12	Tanggul				
	611.13	Pelimpahan banjir				
	611.14	Menara pengambilan				
	611.15	Pembangunan Dermaga				
	611.2	Bangunan Pengambilan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	611.21	Bendungan				
	611.22	Bendungan dengan pintu bilas				
	611.23	Bendungan dengan pintu pompa				
	611.24	Pengambilan bebas				
	611.25	Pengambilan bebas dengan pompa				
	611.26	Sumur dengan pompa				
	611.27	Kantung lumpur				
	611.28	Silf Ekstretor				
	611.29	Escope Chanel				
	611.3	Bangunan Pembawa	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	611.31	Saluran				
	611.311	Saluran induk				
	611.312	Saluran sekunder				
	611.313	Suplesi				
	611.314	Tersier				
	611.315	Saluran Kwarter				
	611.316	Saluran Pasangan				
	611.317	Saluran tertutup/terowongan				

NO.	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	611.32	Bangunan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	611.321	Bangunan bagi				
	611.322	Bangunan bagi dan sadap				
	611.323	Bangunan sadap				
	611.324	Bangunan check				
	611.325	Bangunan terjun				
	611.33	Box Tersier	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	611.34	Got miring				
	611.35	Talang				
	611.36	Shypon				
	611.37	Gorong-gorong				
	611.38	Pelimpahan samping				
	611.4	Bangunan Pembuang	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	611.41	Saluran				
	611.411	Saluran Pembuang Induk				
	611.412	Saluran Pembuang Sekunder				
	611.413	Saluran Pembuang Tersier				
	611.42	Bangunan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	611.421	Bangunan out let				
	611.422	Bangunan terjun				
	611.423	Bangunan penahan banjir				
	611.43	Gorong – gorong pembuang	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	611.44	Talang Pembuang				
	611.45	Sypon Pembuang				

NO.	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	611.5	Bangunan lainnya	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	611.51	Jalan				
	611.511	Jalan Inspeksi				
	611.512	Jalan Logistik				
	611.52	Jembatan				
	611.521	Jembatan Inspeksi				
	611.522	Jembatan Hewan				
	611.53	Tangga Cuci	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	611.54	Kubangan kerbau				
	611.55	Waduk lapangan				
	611.56	Bangunan penunjang				
	611.57	Jaringan telepon				
	611.58	Stasiun Agro				
611.59	Bangunan TPI dan Pasar Ikan					
10.	612	Polder	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	612.1	Tanggul keliling				
	612.11	Tanggul				
	612.12	Bangunan Penutup Sungai				
	612.13	Jembatan				
	612.2	Bangunan Pembawa	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	612.21	Saluran				
	612.211	Saluran muka				
	612.212	Saluran pembawa induk				
	612.213	Saluran pembawa sekunder				
	612.214	Saluran Stasiun Pompa Pemasukan				
	612.22	Bangunan bagi				
	612.221	Gorong-gorong				
	612.222	Sypon				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	612.3	Bangunan Pembuang	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	612.31	Stasiun Pompa Pembuangan				
	612.32	Saluran				
	612.321	Saluran Pembuangan Induk				
	612.322	Saluran Pembuangan Sekunder				
	612.33	Pintu Air Pembuangan				
	612.34	Gorong-gorong Pembuangan				
	612.35	Sypon Pembuangan				
	612.4	Bangunan Lainnya	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	612.41	Bangunan Pengukur Air				
	612.42	Bangunan Pengukur Curah Hujan				
	612.43	Bangunan Gudang Stasiun Pompa				
	612.44	Bangunan Listrik Stasiun Pompa				
	612.5	Rumah Petugas Eksploitasi	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	11.	613	Pasang surut	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	613.1	Bangunan Pembawa	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	613.11	Saluran				
	613.111	Saluran Pembawa Induk				
	613.112	Saluran Pembawa Sekunder				
	613.113	Saluran Pembawa Tersier				
	613.114	Saluran Penyimpan Air				
	613.115	Bangunan Pintu Pemasukan				
	613.2	Bangunan Pembuang	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	613.21	Saluran				
	613.211	Saluran Pembuang Induk				
	613.212	Saluran Pembuang Sekunder				
	613.213	Saluran Pembuang Tersier				
	613.214	Saluran Penyimpanan Air				
	613.215	Bangunan Pintu Pembuangan				
	613.3	Bangunan Lainnya	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	613.31	Kolam Pasang				
	613.32	Saluran				
	613.321	Saluran lalu-lintas				
	613.322	Saluran muka				
	613.33	Bangunan				
	613.331	Bangunan Penangkis Kotoran				
	613.332	Bangunan Pengukur Muka Air				
	613.333	Bangunan Pengukur Curah Hujan				
	613.34	Jalan				
	613.35	Jembatan				
12.	614	Pengendalian Sungai	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	614.1	Bangunan Pengaman	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	614.11	Tanggul Banjir				
	614.12	Pintu Pengatur Banjir				
	614.13	Klep Pengatur Banjir				
	614.14	Tembok Pengaman Talud				
	614.15	Krib				
	614.16	Kantung Lumpur				
	614.17	Check Dam				
614.18	Sypon					
	614.2	Saluran Pengaman	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	614.21	Saluran Banjir				
	614.22	Saluran drainase				
	614.23	Corepure				
	614.3	Bangunan Lainnya	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	614.31	Warning Sistem				
	614.32	Stasiun				
	614.321	Stasiun Pengukur Curah Hujan				
	614.322	Stasiun Pengukur Air				
	614.323	Stasiun Pengukur Cuaca				
614.324	Stasiun Pos Penjagaan					
13.	615	Pengaman Pantai	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	615.1	Tanggul	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	615.2	K r i b	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	615.3	Bangunan lainnya	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
14.	616	Air Tanah	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	616.1	Stasiun Pompa	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	616.2	Bangunan Pembawa	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	616.3	Bangunan Pembuang	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	616.4	Bangunan Lainnya	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
20.	620	J A L A N				
21.	621	Jalan Kabupaten / Kota	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	621.1	Daerah Penguasaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	621.11	Tanah				
	621.12	Tanaman				
	621.13	Bangunan				
	621.2	Bangunan Sementara	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	621.21	Jalan Sementara				
	621.22	Kantor Proyek				
	621.23	Gudang Proyek				
	621.24	Barak Kerja				
	621.25	Laboratorium Lapangan				
	621.26	Rumah				
	621.3	Badan Jalan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	621.31	Pekerjaan Tanah (earth work)				
	621.32	Stabilisasi				
	621.4	Perkerasan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	621.41	Lapisan Pondasi Bawah				
	621.42	Lapisan Pondasi				
	621.43	Lapisan Permukaan				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	621.5	Drainage	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	621.51	Parit Tanah				
	621.52	Gorong-gorong (culvert)				
	621.6	Buku Trotoir	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	621.61	Tanah				
	621.62	Perkerasan				
	621.63	Pasangan				
	621.7	Median	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	621.71	Tanah				
	621.72	Tanaman				
	621.73	Perkerasan				
	621.74	Pasangan				
	621.8	Daerah Sampingan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	621.81	Tanaman				
	621.82	Pagar				
	621.9	Bangunan Pelengkap dan Pengaman	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	621.91	Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas				
	621.92	Lampu penerangan				
	621.93	Lampu Pengatur lalu lintas				
	621.94	Patok – patok KM				
	621.95	Patok – patok R.O.W (Sempadan)				
	621.96	Rel Pengaman				
	621.97	Pagar				
	621.98	Turap Panahan				
	621.99	Bronjong				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
22.	622	Jalan Provinsi				
	622.1	Daerah Penguasaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	622.11	Tanah				
	622.12	Tanaman				
	622.13	Bangunan				
	622.14	Jalan Sementara	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	622.15	Jembatan sementara				
	622.16	Kantor / Gudang Proyek				
	622.17	Barak Kerja				
	622.18	Laboratorium lapangan				
	622.19	Rumah				
	622.2	Badan Jalan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	622.21	Pekerjaan Tanah (earth work)				
	622.22	Stabilisasi				
	622.3	Perkerasan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	622.31	Lapis Pondasi Bawah				
	622.32	Lapis Pondasi				
	622.33	Lapis Permukaan				
	622.4	Drainage	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	622.41	Parit				
	622.42	Gorong-gorong (culvert)				
	622.43	Buku Trotoir				
	622.44	Tanah				
	622.45	Perkerasan				
	622.5	Trotoir	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	622.51	Tanah				
	622.52	Perkerasan				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	622.6	Median	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	622.61	Tanah				
	622.62	Tanaman				
	622.63	Perkerasan				
	622.64	Pasangan				
	622.7	Daerah Samping	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	622.71	Tanaman				
	622.72	Pagar				
	622.8	Bangunan Pelengkap dan Pengamanan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	622.81	Rambu-rambu / tanda-tanda lalu lintas				
	622.82	Lampu penerangan				
	622.83	Lampu Pengatur lalu lintas				
	622.84	Patok – patok KM				
	622.85	Patok – patok R.O.W (Sempadan)				
	622.86	Rel Pengaman				
	622.87	Pagar				
	622.88	Turap Panahan				
	622.89	Bronjong				
23.	623	Jalan Nasional				
	623.1	Daerah Penguasaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	623.2	Badan Jalan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	623.3	Perkerasan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	623.4	Drainase	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	623.5	Median	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	623.6	Daerah samping	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	623.7	Bangunan pelengkap dan pengamanan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
24.	624	Jalan Desa	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
25	625	Jalan Lingkungan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
26.	630	<i>JEMBATAN</i>				
27.	631	Jembatan pada Jalan Kota / Kabupaten	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	631.1	Daerah Penguasaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	631.11	Tanah				
	631.12	Tanaman				
	631.13	Bangunan				
	631.2	Bangunan Sementara	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	631.21	Jalan Sementara				
	631.22	Jembatan Sementara				
	631.23	Kantor Proyek				
	631.24	Gudang Proyek				
	631.25	Barak Kerja				
	631.26	Laboratorium Lapangan				
	631.27	Rumah				
	631.3	Pekerjaan Tanah (earth work)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	631.31	Galian Tanah				
	631.32	Timbunan Tanah				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	631.4	Pondasi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	631.41	Pondasi Kepala Jembatan				
	631.42	Pondasi Pilar				
	631.43	Pondasi Angker				
	631.5	Bangunan Bawah	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	631.51	Kepala Jembatan				
	631.52	Pilar				
	631.53	Pilon				
	631.54	Landasan				
	631.6	Bangunan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	631.61	Gelagar				
	631.62	Lantai				
	631.63	Perkerasan				
	631.64	Jalan Orang/Trotoar				
	631.65	Sandaran				
	631.66	Talang Air				
	631.7	Bangunan Pengaman	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	631.71	Turap/ Penahan				
	631.72	Bronjong				
	631.73	Strek Dam				
	631.74	Kist Dam				
	631.75	Coupute				
	631.76	Krib				
	631.8	Bangunan Pelengkap	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	631.81	Rambu-rambu / Tanda-tanda Lalu Lintas				
	631.82	Patok Pengaman				
	631.83	Patok-Patok ROW (Sempadan)				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	631.9	Oprit	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	631.91	Badan				
	631.92	Perkerasan				
	631.93	Drainage				
	631.94	Baku				
	631.95	Median				
28.	632	Jembatan pada Jalan Provinsi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	632.1	Daerah Penguasaan				
	632.11	Tanah				
	632.12	Tanaman				
	632.13	Bangunan				
	632.2	Bangunan Sementara	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	632.21	Jalan Sementara				
	632.22	Jembatan Sementara				
	632.23	Kantor Proyek				
	632.24	Gudang Proyek				
	632.25	Barak Kerja				
	632.26	Laboratorium Lapangan				
	632.27	Rumah				
	632.3	Pekerjaan Tanah (earth work)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	632.31	Galian Tanah				
	632.32	Timbunan Tanah				
	632.4	Pondasi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	632.41	Pondasi Kepala Jembatan				
	632.42	Pondasi Pilar				
	632.43	Pondasi Angker				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	632.5	Bangunan Bawah	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	632.51	Kepala Jembatan				
	632.52	Pilar				
	632.53	Pilon				
	632.54	Landasan				
	632.6	Bangunan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	632.61	Gelagar				
	632.62	Lantai				
	632.63	Perkerasan				
	632.64	Jalan Orang/Trotoar				
	632.65	Sandaran				
	632.66	Talang Air				
	632.7	Bangunan Pengaman	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	632.71	Turap/ Penahan				
	632.72	Bronjong				
	632.73	Strek Dam				
	632.74	Kist Dam				
	632.75	Coupute				
	632.76	Krip				
	632.8	Bangunan Pelengkap	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	632.81	Rambu-rambu / Tanda-tanda Lalu Lintas				
	632.82	Patok Pengaman				
	632.83	Patok-Patok ROW (Sempadan)				
	632.9	Oprit	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	632.91	Badan				
	632.92	Perkerasan				
	632.93	Drainage				
	632.94	Baku				
	632.95	Median				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
29.	633	Jembatan pada Jalan Nasional				
	633.1	Daerah Penguasaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	633.2	Bangunan Sementara	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	633.3	Pondasi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	633.4	Bangunan bawah	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	633.5	Bangunan pengamanan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra
	633.6	Bangunan pelengkap dan pengaman	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
30.	640	BANGUNAN				
31.	641	Bangunan Pemerintah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	641.1	Gedung Pengadilan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	641.2	Rumah Pejabat Negara	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	641.3	Gedung DPR	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	641.4	Gedung Balai Kota	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	641.5	Penjara	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	641.6	Perkantoran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
32.	642	Bangunan Pendidikan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	642.1	Taman Kanak-kanak	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	642.2	SD dan Sekolah Menengah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	642.3	Perguruan Tinggi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
33.	643	Bangunan Rekreasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	643.1	Bangunan olah raga	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	643.2	Gedung kesenian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	643.3	Gedung Pemancar	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
34.	644	Bangunan Perdagangan				
	644.1	Pusat Perbelanjaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	644.2	Gedung Perdagangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	644.3	Bank	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	644.4	Perkantoran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
35.	645	Bangunan Pelayanan Umum	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	645.1	Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	645.2	Rumah Sakit	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	645.3	Bangunan Keagamaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
36.	646	Bangunan Peninggalan Sejarah				
	646.1	Monumen	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	646.2	Candi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	646.3	Keraton	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	646.4	Rumah Tradisional	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
37.	647	Bangunan Industri	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
38.	648	Bangunan Tempat Tinggal				
	648.1	Rumah Perkotaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	648.11	Inti / Sederhana				
	648.12	Sedang / Mewah				
	648.2	Rumah Pedesaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	648.21	Rumah Contoh				
	648.3	Real Estate	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	648.31	Pengesahan Site Plan				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
39.	649	Elemen Bangunan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	649.1	Pondasi				
	649.11	Diatas Tiang				
	649.2	Dinding	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	649.21	Penahan Beban				
	649.22	Tidak Menahan Beban				
	649.3	Atap	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	649.31	Atap genteng				
	649.32	Atap asbes				
	649.33	Atap seng				
	649.4	Lantai / Langit-langit	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	649.41	Suspended				
	649.42	Solit				
	649.5	Pintu / Jendela	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	649.51	Pintu Hermonik				
	649.52	Pintu Biasa				
	649.53	Pintu Sorong				
	649.54	Jendela Kayu				
649.55	Jendela Sorong					
649.56	Jendela Vertikal					

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
40.	650	TATA RUANG KOTA				
41.	651	Daerah perdagangan/pelabuhan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	651.1	Daerah pusat perdagangan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	651.2	Daerah perkantoran	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
42.	652	Daerah pemerintahan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
43.	653	Daerah perumahan (<i>site dan servei</i>)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	653.1	Kepadatan rendah (<i>low density</i>)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	653.2	Kepadatan tinggi (<i>high density</i>)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
44.	654	Daerah Industri	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	654.1	Industri berat	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	654.2	Industri ringan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	654.3	Industri rumah (<i>home industry</i>)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
45.	655	Daerah Rekreasi	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	655.1	Taman Umum (Public Garden)	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	655.2	Taman Bermain dan Olahraga (<i>Sport & Playing Fields</i>)	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	655.3	Ruang terbuka umum (<i>Open Space</i>)	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	655.4	Makam Umum	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
46.	656	Transportasi (tata letak)	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	656.1	Jaringan jalan	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	656.11	Penerangan jalan				
	656.2	Jaringan kereta api	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	656.3	Jaringan sungai	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	656.4	Jalur sepeda	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
47.	657	<i>Assineering</i> / penghancur kotoran	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Dinas LH PEMDES : Seksi Kesra
	657.1	Saluran pengumpulan	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Dinas LH PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	657.2	Instansi pengolahan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DLH, DPU PEMDES : Seksi Kesra
	657.21	Bangunan				
	657.22	Bangunan penyaring				
	657.23	Bangunan penghancur kotoran				
	657.24	Bangunan pengendapan				
	657.25	Bangunan pengering lumpur				
	657.26	Unit Desinfektan				
	657.27	Unit Perpompaan				
48.	658	Kesehatan Lingkungan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DLH, DINKES PEMDES : Seksi Kesra
	658.1	Persampahan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	658.11	Bangunan pengumpul				
	658.12	Bangunan pemusnahan				
	658.2	Pengotoran udara	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DLH PEMDES : Seksi Kesra
	658.3	Pengotoran air	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DLH PEMDES : Seksi Kesra
	658.31	Air buangan industri				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	658.4	Kegaduhan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DLH PEMDES : Seksi Kesra
	658.5	Kebersihan kota	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DLH PEMDES : Seksi Kesra
49.	659	Dokumen Tata Ruang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	659.1	Keterangan Rencana Daerah / Advice Planning	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	659.2	Penetapan Lokasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
50.	660	<i>TATA LINGKUNGAN</i>				
	660.1	Lingkungan Hidup	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DLH PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	660.2	Kebersihan lingkungan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DLH PEMDES : Seksi Kesra
	660.3	Pencemaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	660.31	Pencemaran air				
	660.32	Pencemaran udara				
	660.33	Pencemaran tanah				
	660.34	Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), limbah beracun dan berbahaya (LB3) dan bahan perusak ozon (BPO)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DLH PEMDES : Seksi Kesra
	660.35	Instalasi pencemaran air limbah (IPAL)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DLH PEMDES : Seksi Kesra
	660.36	Baku mutu lingkungan				
51.	661	Kerusakan lingkungan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DLH PEMDES : Seksi Kesra
52.	662	Konservasi lingkungan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DLH PEMDES : Seksi Kesra
	662.1	Konservasi pesisir dan laut	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DLH PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	662.2	Konservasi sumber daya alam	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DLH PEMDES : Seksi Kesra
53.	663	Penegakan hukum lingkungan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DLH PEMDES : Seksi Kesra
54.	664	Laboratorium lingkungan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DLH PEMDES : Seksi Kesra
	664.1	Air	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DLH PEMDES : Seksi Kesra
	664.2	Udara	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DLH PEMDES : Seksi Kesra
	664.3	Tanah	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DLH PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
55.	665	Dokumen lingkungan dan perizinan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	665.1	Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	665.2	UKL/UPL, SPPL	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
	665.3	Izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DPU, DINPERKIM PEMDES : Seksi Kesra
56.	666	Pengembangan teknologi lingkungan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DLH PEMDES : Seksi Kesra
57.	667	Pengembangan kapasitas lingkungan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DLH PEMDES : Seksi Kesra
58.	668	Pengamanan lingkungan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	DLH PEMDES : Seksi Kesra

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
59.	670	KETENAGAAN				
60.	671	Listrik	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Urusan Pemerintah Pusat
	671.1	Kelistrikan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Urusan Pemerintah Pusat
	671.11	Kelistrikan PLN				
	671.12	Kelistrikan Non PLN				
	671.2	Pembangkit Tenaga Listrik	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Urusan Pemerintah Pusat
	671.21	PLTA – Pembangkit Listrik Tenaga Air				
	671.22	PLTD – Pembangkit Listrik Tenaga Diesel				
	671.23	PLTG - Pembangkit Listrik Tenaga Gas				
	671.24	PLTM – Pembangkit Listrik Tenaga Matahari				
	671.25	PLTN – Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir				
	671.26	PLTPB – Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi				
	671.27	PLTU – Pembangkit Listrik Tenaga Uap				
	671.3	Transmisi Tenaga Listrik	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Urusan Pemerintah Pusat
	671.31	Gardu Induk / Gardu Penghubung / Gardu Trafo				
671.32	Saluran Udara Tegangan Tinggi					
671.33	Kabel Bawah Tanah					

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	671.4	Distribusi Tenaga Listrik	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	671.41	Gardu Distribusi				
	671.42	Tegangan Tinggi				
	671.43	Tegangan Menengah				
	671.44	Tegangan Rendah				
	671.45	Jaringan Bawah Tanah				
	671.5	Pengusahaan Listrik	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	672.51	Sambungan Listrik				
	671.52	Penjualan Tenaga Listrik				
	671.53	Tarif Listrik				
	671.6	Jaringan Listrik	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
	671.61	Pemeliharaan Jaringan				
	671.62	Perluasan Jaringan				
61.	672	Tenaga Air	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang menggangu kinerja	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
62.	673	Tenaga Minyak	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang menggangu kinerja	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
63.	674	Tenaga Gas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang menggangu kinerja	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
64.	675	Tenaga Matahari	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang menggangu kinerja	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
65.	676	Tenaga Nuklir	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
66.	677	Tenaga Panas Bumi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
67.	678	Tenaga Uap	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
68	679	Tenaga Lainnya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
69.	680	<i>PERALATAN PEKERJAAN UMUM</i>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	<i>Urusan Pemerintah Pusat</i>
70.	690	<i>AIR MINUM</i>				
71.	691	I n t a k o	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	PDAM
	691.1	Bromcaptering	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	PDAM

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	691.2	S u m u r	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	PDAM
	691.21	Sumur pompa				
	691.22	Sumur Artetis				
	691.3	Bendungan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	PDAM
	691.4	Saringan (Screen)				
	691.5	Pintu Air				
	691.6	Saluran Pembawa				
	691.7	Alat Ukur				
	691.8	Perpompaan				
	72.	692	Transmisi Air Baku	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja
692.1		Perpipaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	PDAM
692.2		Katup Udara (air relief)				
692.3		Katup Penguras (blow off)				
692.4		Bak Pelapas Tekanan				
692.5		Jembatan Pipa				
692.6		Syphon				
73.	693	Instalasi Pengelolaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	PDAM
	693.1	Bangunan Ukur				
	693.2	Bangunan Aerasi				
	693.3	Bangunan Pengendapan				
	693.4	Bangunan Pembubuhan Bahan Kimia				
	693.5	Bangunan Pengaduk	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan,		PDAM
693.6	Bangunan Saringan					

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	693.7	Perpompaan		pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	
	693.8	Clear Hell				
74.	694	Distribusi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	PDAM
	694.1	Reservoir menara bawah tanah				
	694.11	M e n a r a				
	694.12	Reservoir dibawah tanah				
	694.2	Perpipaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	PDAM
	694.3	Perpompaan				
	694.4	Jembatan Pipa				
	694.5	Syphon				
	694.6	Hydran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	PDAM
	694.61	Hydran umum				
	694.62	Hydran kebakaran				
	694.7	K a t u p	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	PDAM
	694.71	Katup udara (air relief)				
	694.72	Katup pelepas (blow off)				
	694.8	Bak pelepas tekanan (pressure reducing valve)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	PDAM
75.	695	Tarif Air Minum	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	PDAM

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
VIII	700	PENGAWASAN				
1.	701	Pengawasan Urusan Dalam meliputi pengawasan sarana dan fasilitas kantor	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
2.	702	Pengawasan Peralatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
3.	703	Pengawasan Kekayaan Daerah	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
4.	704	Pengawasan Perpustakaan / Dokumentasi / Kearsipan / Sandi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
5.	705	Pengawasan Perencanaan Pengadaan / Proyek	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
6.	706	Pengawasan Organisasi dan Ketatalaksanaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
7.	707	Pengawasan Penelitian/Riset	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
8.	708	Pengawasan Konferensi / Rapat Dinas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
9.	709	Pengawasan Perjalanan Dinas Pejabat/PNS	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
	710	<i>BIDANG PEMERINTAHAN</i>				
10	711	Pengawasan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemprov	<i>INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI</i>
11.	712	Pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH Perangkat Daerah : Sekretariat dan seluruh bidang/seksi
12.	713	Pengawasan Pemerintahan Desa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
13.	714	Pengawasan Hukum/ Konstitusi/ Peraturan Lain	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
	720	<i>BIDANG POLITIK</i>				
14.	721	Pengawasan Partai, termasuk pendanaan, keanggotaan, atribut partai, dll.	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
15.	722	Pengawasan pembinaan ipolek sosbud hankam	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
16.	723	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan / Keagamaan / Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
17.	724	Pengawasan Organisasi Profesi dan Fungsional	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
18.	725	Pengawasan Organisasi Kepemudaan/ Olahraga	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
19.	726	Pengawasan Buruh, Tani dan Nelayan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
20.	727	Pengawasan Organisasi Wanita	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
	730	<i>BIDANG KEAMANAN/ KETERTIBAN</i>				
21.	731	Pengawasan Kesbangpolinmas	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
22.	732	Pengawasan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam / SAR	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
	740	<i>BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT</i>				
23.	741	Pengawasan Pembangunan Desa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
24.	742	Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
25.	743	Pengawasan Kebudayaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
26.	744	Pengawasan Kesehatan / Makanan/ Obat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
27.	745	Pengawasan SARA (Suku, Agama, Ras)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
28.	746	Pengawasan Kesejahteraan Sosial	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES :
29.	747	Pengawasan Kependudukan Migrasi/ Urbanisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
30.	748	Pengawasan Media Massa, Kehumasan dan Penyiaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
31.	749	Pengawasan Bantuan/ Subsidi Masyarakat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
	750	<i>BIDANG PEREKONOMIAN</i>				
32.	751	Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
33.	752	Pengawasan Pertanian dan Perkebunan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
34.	753	Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
35.	754	Pengawasan Perikanan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
36.	755	Pengawasan energi dan Sumber Daya Mineral	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda	INSPEKTORAT DAERAH PROV. PEMDES : Urusan TU dan Umum
37.	756	Pengawasan Perhubungan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
38.	757	Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
39.	758	Pengawasan Permodalan (PMDN / PMA)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
40.	759	Pengawasan Perbankan / Moneter	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	760	<i>BIDANG PEKERJAAN UMUM</i>				
41.	761	Pengawasan Pengairan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
42.	762	Pengawasan Jalan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
43.	763	Pengawasan Jembatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
44.	764	Pengawasan Bangunan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
45.	765	Pengawasan Tata Ruang Kota	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
46.	766	Pengawasan Tata Lingkungan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
47.	767	Pengawasan Ketenagaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
48.	768	Pengawasan Air Minum	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	770	<i>PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK</i>				
49.	771	Penyimpangan Pejabat Publik	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
50.	772	Laporan Pertanggungjawaban Bupati	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
	780	<i>BIDANG KEPEGAWAIAN</i>				
51.	781	Pengawasan Pengadaan PNS	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
52.	782	Pengawasan Pengangkatan dan Mutasi Pegawai	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
53.	783	Pengawasan Kedudukan/ Jabatan PNS	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
54.	784	Penyimpangan Pejabat / PNS	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
55.	785	Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
56.	786	Pengawasan Pemberhentian PNS	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
57.	787	Pengawasan Pendidikan PNS	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
58.	788	Pengawasan Keanggotaan PNS dalam Parpol	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
	790	<i>BIDANG KEUANGAN</i>				
59.	791	Pengawasan Anggaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
60.	792	Pengawasan Verifikasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
61.	793	Pengawasan Pembukuan, Akuntansi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
62.	794	Pengawasan Perbendaharaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
63.	795	Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum
64.	796	Pengawasan Pendapatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	INSPEKTORAT DAERAH PEMDES : Urusan TU dan Umum

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
IX	800	KEPEGAWAIAN				
		Kebijakan Kepegawaian				
1.	801	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	801.1	Analisis Jabatan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM SETDA : Bag.Organisasi Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	801.2	Analisis Beban Kerja	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM SETDA : Bag.Organisasi Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	801.3	Peta Jabatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM SETDA:Bag.Organisasi Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
2.	802	Penelitian	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	802.1	Pengaduan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	802.2	Team	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	802.3	Statistik	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
3.	803	Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	803.1	Izin melakukan perceraian	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	803.2	Keterangan untuk melakukan perceraian	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	803.3	Izin untuk beristri lebih dari satu	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	803.4	Laporan perceraian / perkawinan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
4.	810	PENGADAAN				
5.	811	Perencanaan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	811.1	Jadwal Pengadaan PNS	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	811.2	Prasarana dan sarana pengadaan PNS	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
6.	812	Pengumuman Lowongan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
7.	813	Lamaran	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
8.	814	Seleksi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	814.1	Seleksi Administrasi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	814.2	Seleksi Kompetensi Dasar	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	814.3	Seleksi Kompetensi Bidang	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
9.	815	Pengumuman hasil seleksi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10.	816	Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	816.1	Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I				
	816.2	Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II				
	816.3	Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III				
11.	817	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	817.1	Pengangkatan PNS Golongan I				
	817.2	Pengangkatan PNS Golongan II				
	817.3	Pengangkatan PNS Golongan III				
12.	818	Sumpah Janji	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
13.	819	Pengangkatan PPPK dan Tenaga Harian Lepas, Honorer	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	819.1	Pengangkatan PPPK				
	819.2	Pengangkatan Tenaga Harian Lepas, Honorer				
14.	820	<i>MUTASI</i>				
	820.1	Mutasi dalam satu instansi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	820.11	Pelaksana				
	820.12	Pengawas				
	820.13	Adminstrator				
	820.14	Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)				
	820.15	Fungsional				
820.2	Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (semua golongan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian	

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	820.3	Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (semua golongan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	820.4	Mutasi PNS Provinsi / Kabupaten/Kota ke instansi pusat atau sebaliknya (semua golongan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
15.	821	Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	821.1	Pengangkatan dalam jabatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	821.11	Pengangkatan Pelaksana				
	821.12	Pengangkatan menjadi Pengawas				
	821.13	Pengangkatan menjadi Administrator				
	821.14	Pengangkatan menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi				
	821.2	Pemberhentian dalam jabatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	821.21	Pemberhentian Pelaksana				
	821.22	Pemberhentian Pengawas				
	821.23	Pemberhentian Administrator				
	821.24	Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi				
	821.3	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	821.31	Jabatan Pelaksana				
	821.32	Jabatan Pengawas				
	821.33	Jabatan Administrasi				
	821.34	Jabatan Pimpinan Tinggi				
	821.4	Berita Acara Serah Terima Jabatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	821.5	Pernyataan Pelantikan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	821.6	Pengangkatan dalam jabatan fungsional, pemberhentian, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, sumpah janji, pernyataan pelantikan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	821.61	Penetapan Angka Kredit				
	821.62	Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional				
	821.63	Pelantikan dan pengambilan sumpah /janji				
	821.64	Pernyataan pelantikan				
	821.65	Kenaikan jabatan				
	821.66	Pembebasan sementara				
	821.67	Pemberhentian				
	821.68	Pengangkatan kembali				
16.	822	Kenaikan Gaji Berkala	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	822.1	PNS golongan I				
	822.2	PNS golongan II				
	822.3	PNS golongan III				
	822.4	PNS golongan IV				
17.	823	Kenaikan Pangkat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	823.1	PNS golongan I				
	823.2	PNS golongan II				
	823.3	PNS golongan III				
	823.4	PNS golongan IV				
18.	824	Pemindahan / pelimpahan / pembantuan / alih kepegawaian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM,Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
19.	825	Datasering / penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
20.	826	Izin PNS mencalonkan diri menjadi Kades	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	826.1	Keputusan pemberian izin	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	826.2	Pembebasan sementara dari jabatan organik	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	826.3	Pengangkatan kembali	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
21.	827	Menghadapkan PNS	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
22.	828	Surat pernyataan melaksanakan tugas	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
23.	830	<i>KEDUDUKAN</i>				
24.	831	Penghitungan / peninjauan masa kerja	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
25.	832	Penyesuaian / inpassing pangkat / gaji	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	832.1	Pegawai Golongan I				
	832.2	Pegawai Golongan II				
	832.3	Pegawai Golongan III				
	832.4	Pegawai Golongan IV				
26.	833	Izin penggunaan gelar	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
27.	834	Penghargaan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
28.	840	<i>KESEJAHTERAAN PEGAWAI</i>				
29.	841	Tunjangan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	841.1	Jabatan				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	841.2	Tunjangan Hari Raya	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	841.3	Tambahan Penghasilan / Tunjangan Kinerja dan yang sejenis	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	841.4	Keluarga	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	841.5	Tunjangan lainnya	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
30.	842	Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	842.1	Taspen				
	842.2	BPJS				
31.	843	Perlindungan				
	843.1	Jaminan kesehatan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	843.2	Jaminan kecelakaan kerja	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	843.3	Jaminan kematian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	843.4	Bantuan Hukum	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
32.	844	Izin PNS melaksanakan kegiatan usaha	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
33.	845	Perumahan				
	845.1	Perumahan Pegawai	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	845.2	Tanah Kapling	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
34.	846	Bantuan Sosial	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	846.1	Bantuan Kebakaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	846.2	Bantuan Kebutuhan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
35.	847	Rekreasi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
36.	848	Dispensasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
37.	850	<i>CUTI</i>				
38.	851	Cuti tahunan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
39.	852	Cuti besar	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
40.	853	Cuti sakit	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
41.	854	Cuti melahirkan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
42.	855	Cuti karena alasan penting	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
43.	856	Cuti diluar tanggungan negara	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
44.	857	Cuti bersama	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
45.	860	<i>PENILAIAN</i>				
46.	861	Penghargaan				
	861.1	Tanda Kehormatan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	861.2	Kenaikan Pangkat Istimewa	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	861.3	Kesempatan prioritas pengembangan kompetensi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	861.4	Kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	861.5	Pegawai Teladan / PNS berprestasi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
46.	862	Hukuman Disiplin	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	862.1	Hukuman disiplin ringan				
	862.11	Teguran lisan				
	862.12	Teguran tertulis				
	862.13	Pernyataan tidak puas secara tertulis				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	862.2	Hukuman disiplin sedang	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	862.21	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun				
	862.22	Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 tahun				
	862.23	Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun				
	862.3	Hukuman disiplin berat	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	862.31	Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun				
	862.32	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah				
	862.33	Pembebasan dari jabatan				
	862.34	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS				
47.	863	Penilaian Kinerja				
	863.1	Pelaksana	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	863.2	Pengawas, Administrator dan JPT	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	863.3	Fungsional	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	863.4	Tim Penilai Kinerja PNS	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
48.	864	Ujian Dinas				
	864.1	Tingkat I	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	864.2	Tingkat II	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	864.3	Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UKPPI)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
49.	865	Penilaian kehidupan pegawai negeri meliputi : Petunjuk pelaksanaan hidup sederhana, penilaian kekayaan pribadi (LP2P, LHKPN, LHKASN)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
50.	866	Rehabilitasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
51.	867	GDN	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
52.	868	Proses pemeriksaan berkaitan dengan pelanggaran disiplin	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	868.1	Surat panggilan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	868.2	Berita acara pemeriksaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	868.3	Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	868.4	Laporan hasil pemeriksaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
53.	869	Uji Kompetensi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
54.	870	<i>TATA USAHA KEPEGAWAIAN</i>				
55.	871	Formasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
56.	872	Bezetting (Daftar Urut Kepangkatan)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
57.	873	Sistem Informasi Kepegawaian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	873.1	NIP	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	873.2	KARPEG	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	873.3	Legitimasi / tanda pengenal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	873.4	Daftar Keluarga	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	873.5	KARIS/ KARSU	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
58.	874	Daftar Riwayat Pekerjaan				
	874.1	Tanggal lahir	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	874.2	Penggantian nama	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	874.3	Organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
59.	875	Kewenangan mutasi kepegawaian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	875.1	Pelimpahan wewenang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	875.2	Specimen tanda tangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
60.	876	Penggajian	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	876.1	SKPP	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
61.	877	Korps Kepegawaian	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
62.	880	<i>PEMBERHENTIAN</i>				
63.	881	Pemberhentian atas permintaan sendiri	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
64.	822	Pemberhentian karena mencapai BUP	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	882.1	PNS Golongan I				
	882.2	PNS Golongan II				
	882.3	PNS Golongan III				
	882.4	PNS Golongan IV				
65.	883	Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas atau hilang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
66.	884	Pemberhentian karena alasan lain :				
	884.1	Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	884.2	Pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	884.3	Pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPD; Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	884.4	Pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	884.5	Pemberhentian karena melakukan tindak pidana / penyelewengan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	884.6	Pemberhentian karena pelanggaran disiplin	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
67.	886	Pemberhentian Sementara	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
68.	887	Pembekalan PNS yang akan purna tugas	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
68.	888	Masa Persiapan Pensiun (MPP)	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
69.	890	<i>PENDIDIKAN PEGAWAI</i>				
	890.1	Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan Diklat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
70.	891	Pendidikan Pra Jabatan.	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
71.	892	Pendidikan Dalam Jabatan				
		Diklatpim	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	892.2	Diklat Teknis	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	892.3	Diklat Fungsional	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
72.	893	Bimbingan Teknis, Kursus-kursus, penataran	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
73.	894	Pengembangan Pegawai	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	894.1	Tugas Belajar	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	894.2	Izin Belajar	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	894.3	Penempatan kembali	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
74.	895	Metode				
	895.1	Kuliah	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	895.2	Ceramah, simposium	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	895.3	Diskusi, seminar, lokakarya, orientasi	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	895.4	Kuliah lapangan / Orientasi Lapangan, widya wisata, KKN	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	895.5	Kurikulum	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	895.6	Karya Tulis, Proyek Perubahan (Proper)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
75.	896	Tenaga pengajar, Widya Iswara, Nara sumber	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	896.1	Usul menjadi Tenaga Pengajar	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	896.2	Permintaan tenaga pengajar, nara sumber	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	896.3	Penambahan tenaga pengajar	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
76.	897	Adiministrasi pendidikan				
	897.1	Tahun Pelajaran	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	897.2	Persyaratan, pendaftaran, testing, ujian	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	897.3	STTP	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	897.5	Laporan Pendidikan dan Pelatihan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
77.	898	Fasilitas				
	898.1	Tunjangan belajar	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	898.2	Asrama	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	898.3	Uang makan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	898.4	Uang transport	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	898.5	Uang buku	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
78.	899	Sarana				
	899.1	Persediaan Buku	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
	899.2	Gedung	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pempdes	BKPSDM Perangkat Daerah : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
X	900	KEUANGAN				
1.	901	Nota Keuangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
2.	902	APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
3.	903	APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
4.	904	APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
5.	910	ANGGARAN				
6.	911	Keputusan penunjukkan pengelola keuangan PERANGKAT DAERAH	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
7.	912	KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
8.	913	Anggaran Belanja Tambahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
9.	914	Daftar Isian Kegiatan (DIK)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
10.	915	Daftar Isian Proyek (DIP)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
11.	916	RKA (Rencana Kerja Anggaran)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
12.	917	DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
13.	918	Belanja Tidak Langsung (Hibah Bansos, dll.)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
14.	920	<i>VERIFIKASI</i>				
15.	921	SPM Belanja Langsung	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
16.	922	SPM Belanja Tidak Langsung	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
17.	923	Penerimaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
18.	924	SPJ Belanja Langsung	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
19.	925	SPJ Belanja Tidak Langsung	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
20	926	Nota Pemeriksaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
21.	927	SP Pemindahbukuan (SPPP)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
22.	928	SPP (Surat Permintaan Pembayaran)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
23.	929	SPJ Subsidi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
24.	930	<i>PEMBUKUAN (AKUNTANSI)</i>				
25.	931	Penyusunan Perhitungan Anggaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
26.	932	Permintaan Data Anggaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
27.	933	Laporan Fisik Pembangunan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
28.	934	Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
29.	935	Berita Acara Rekonsiliasi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
30.	936	Cash opname	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
31.	940	<i>PERBENDAHARAAN</i>				
32.	941	SPD (Surat Penyediaan Dana)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
33.	942	SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
34.	943	Daftar Penguji SP2D (Advis)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
35.	944	Penggantian Bendahara Penerimaan / Pengeluaran	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
36.	945	Specimen tanda tangan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
37.	946	Tuntutan Perbendaharaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
38.	950	<i>PEMBINAAN PERBENDAHARAAN</i>				
39.	951	Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
40.	952	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
41.	953	Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
42.	954	Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)	Biasa / Terbuka	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
43.	955	Kerjasama dengan Bank	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
44.	956	Urusan Rekening Daerah	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
45.	957	Deposito	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
46.	958	Giro	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
47.	960	<i>PENGELOLAAN KAS DAERAH</i>				
48.	961	Laporan realisasi penerimaan daerah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
49.	962	Laporan realisasi pengeluaran daerah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
50.	964	Penerimaan Kas Non Anggaran (potongan Taspen, Askes, PPh, PPn, penerimaan lainnya yang sejenis)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
51.	965	Pengeluaran Kas Non Anggaran (penyetoran Taspen, Askes, PPh, PPn, pengeluaran lainnya yang sejenis)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	Badan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan Pemdes :Urusan Keuangan
52.	970	<i>PENDAPATAN</i>				
53.	971	Perimbangan Keuangan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	971.1	Bagi Hasil Pajak	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	971.11	Pajak Bumi Bangunan (PBB)				
	971.12	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				
	971.13	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21)				
	971.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	971.21	Pemberian Hak Atas Tanah				
	971.22	Sumber Daya Hutan				
	971.23	Sumber Daya Alam/ Migas				
54.	972	Subsidi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
55.	973	Pajak	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	973.1	Pajak Kendaraan Bermotor	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	973.2	Pajak Kendaraan Diatas air	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	973.3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	973.4	Pajak Reklame	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	973.5	Pajak Hotel	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	973.6	Pajak Restoran	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	973.7	Pajak Penerangan Jalan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	973.8	Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan ABT (Air Bawah Tanah)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	973.9	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan AP (Air Permukaan)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	973.10	Pajak lainnya	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
56.	974	Retribusi	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	974.1	Retribusi bidang kesehatan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	974.2	Retribusi bidang seni, budaya dan pariwisata	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	974.3	Retribusi bidang perekonomian, perindustrian dan perdagangan (termasuk pasar).	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	974.4	Retribusi bidang pertanian	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	974.5	Retribusi bidang perikanan dan peternakan (termasuk pemotongan hewan)	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	974.6	Retribusi bidang perkebunan dan kehutanan	Biasa / Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	974.7	Retribusi bidang perhubungan, komunikasi informasi dan teknologi (termasuk trayek, kelebihan muatan, telekomunikasi, parkir, dsb.)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	974.8	Retribusi izin pengambilan dan pemanfaatan ABT/ AP	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	974.9	Retribusi lainnya	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
57.	975	Bea	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
58.	976	Cukai	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
59.	977	Pungutan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
60.	978	Bantuan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	978.1	Bantuan Presiden	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	978.2	Bantuan Menteri	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	978.3	Bantuan Gubernur	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	978.4	Bantuan Bupati	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	978.5	Bantuan Lainnya	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
61.	979	Pendapatan Lainnya	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	979.1	Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	979.11	Pelepasan Hak Atas Tanah	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	979.12	Penjualan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	979.13	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	979.14	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	979.15	Penjualan Bongkaran Bangunan dan Inventaris	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	979.16	Penjualan Drum Bekas	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	979.17	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
62.	979.2	Penerimaan Jasa Giro	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	979.21	Jasa Giro Kas Daerah				
	979.22	Jasa Giro Pemegang Kas				
	979.23	Jasa Giro Khusus				
63.	979.3	Penerimaan bunga bank	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES :Urusan Keuangan
	979.31	Bunga Deposito				
	979.32	Bunga Tabungan				

NO	KODE KASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
64.	979.4	Penerimaan ganti rugi atas kerugian / kehilangan kekayaan daerah (TP-TGR)	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES : Urusan Keuangan
	979.41	Sumbangan Pihak Ketiga				
	979.42	Sumbangan Pihak Ketiga Kendaraan (Dealer)				
65.	979.43	Sumbangan Pihak Ketiga Kayu	Biasa / Terbuka	1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana kebijakan 3. Pengawas internal / eksternal 4. Publik 5. Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemda dan Pemdes	BAPENDA Perangkat Daerah : Sub Bag Keuangan PEMDES : Urusan Keuangan
	979.5	Penerimaan Lain-lain				
	979.51	Penerimaan kembali kredit BKK				
	979.52	Ternak Tidak Layak Bibit				
	979.53	Sewa Internet				
	979.54	Penerimaan dari Dana Bergulir/Revolving				
	979.55	Kerjasama dengan BUMIDA				
	979.56	Penerimaan DUKS				
	979.57	Tempat Rekreasi				
	979.58	Setoran TP-TGR				
979.59	Penerimaan Lainnya dari Setda / Dinas / Badan / Kantor dan Instansi Lainnya					



BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 36 TAHUN 2020
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
 DINAMIS PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DAN
 PEMERINTAH DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN
 BANYUMAS

KETENTUAN PENGGUNAAN PRASARANA DAN SARANA PENYIMPANAN ARSIP DINAMIS

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP					
		ARSIP KONVENSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK		
		ARSIP	PENGGUNA	SARANA DAN PRASARANA	ARSIP	PENGGUNA	SARANA DAN PRASARANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Biasa / Terbuka	Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus	<i>Back up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memerlukan sarana dan prasarana khusus
2.	Terbatas	Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "TERBATAS" pada fisik arsip	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum.	Diperlukan tempat penyimpanan yang aman	a. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip; b. File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak- pihak eksternal	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	a. <i>Autentikasi server</i> ; b. Langkah-langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasi khusus; c. <i>Firewall</i> dan sistem-sistem serta prosedur prosedur deteksi terhadap intrusi

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Rahasia	Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap "RAHASIA" pada fisik arsip	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum.	Diperlukan prasarana dan sarana khusus.	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip; b. File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal. 	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum.	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Autentikasi server</i>; b. Langkah-langkah keamanan dengan Operating System khusus atau aplikasi khusus; c. <i>Firewall</i> serta sistem-sistem dan prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

